

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENANGANAN PERSAMPAHAN ORGANIK DAN
ANORGANIK DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

**TEUKU AFRIZAL
1405902010050**



**PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
ACEH BARAT
2021**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENANGANAN PERSAMPAHAN ORGANIK DAN
ANORGANIK DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Pada Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar**

**TEUKU AFRIZAL
1405902010050**



**PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH
2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

KAMPUS UTU, MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59

Laman www.fkm.utu.ac.id email fkm@utu.ac.id

Meulaboh, 20 Desember 2021

Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Jenjang : S1 (Strata Satu)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara

Nama : Teuku Afrizal
NIM : 1405902010150

Dengan judul: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENANGANAN PERSAMPAHAN ORGANIK DAN
ANORGANIK DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH BARAT

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat- syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar

Mengesahkan :

Ketua Komisi Pembimbing

Zakiyuddin, SKM, M.Kes
NIP. 198806182019031007

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Kesehatan Masyarakat

Prof. Dr. drh. Darmawi, M.Si
NIP. 197008271997021001

Ketua Program Studi
Ilmu Kesehatan Masyarakat

Fitrah Reynaldi, SKM, M.Kes
NIP. 198905212019031009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : www.utu.ac.id email: fkm@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 10 Desember 2021

Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Jenjang : S1 (Strata Satu)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Teuku Afrizal
NIM : 1405902010050

Dengan judul :

Yang telah dipertahankan didepan Komisi Ujian pada Tanggal 10 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Menyetujui
Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Zakiyuddin, SKM., M.Kes
2. Anggota : Darmawan, SKM., M.Kes
3. Anggota : Siti Maisaroh Fitri S, SKM. M.Kes

Mengetahui :
Ketua Program Studi
Kesehatan Masyarakat

Fitrah Revnaldi, SKM., M.Kes
NIP. 198905212019031009

PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEUKU AFRIZAL
Nim : 1405902010050

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat di pandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Meulaboh, Agustus 2021

Saya yang membuat pernyataan,



TEUKU AFRIZAL

Nim : 1405902010050

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur ku persembahkan bagi sang penggenggam langit dan bumi, dengan rahman rahim yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya. Dzat yang menganugerahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa merindu akan kemaha besaran-Nya.

Lantunan sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa, menjadi persembahan penuh kerinduan pada sang revolusioner Islam, pembangun peradaban manusia yang beradab Habibana wanabiyana Muhammad SAW..

Ayahanda dan Ibunda

Tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberatkan langkah, tangis keputasaan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari kini menjadi tangisan penuh kesyukuran dan kebahagiaan yang tumpah dalam sujud panjang. Betapa perih perjalanan ini, namun ku coba bertahan dengan keyakinan, Doa dan tetesan keringat mu akan mengantarkanku Kemasa depan yang cerah serta lentera di gelapnya malam.

Ayahanda dan Ibunda

*Kini harapanku telah kugapai, Sambutlah aku anakmu didepan pintu,
Tempat dimana dulu anakmu mencium tanganmu
Allahummafirli walwalidaiyya Warhamhuma kamarabbayani saghira
Antara perjuangan dan doa ku persembahkan Skripsi ini kepada ayahanda dan ibunda
tesayang*

Dosen ku

Kepada Bapak Zakiyuddin, SKM, M.Kes yang telah membimbing saya selama penyelesaian tugas akhir ini. Saya ucapkan terima kasih atas ilmu, nasehat, cerita yang telah Bapak beri pada saya.

*Terimakasih atas kesabaran ibu selama masa bimbingan
saya walau saya banyak kekurangan dan kelalaian*

Terimakasih juga kepada dosen penguji I Ibu Darmawan, SKM, M.Kes dan Dosen penguji II Ibu Siti Maisyaroh Fitri S, SKM, M.Kes atas masukannya untuk perbaikan skripsi saya, dan terimakasih juga atas kesediaan waktunya dalam seminar proposal dan juga uji skripsi.

Teman – teman ku

Terimah kasih buat sahabat ku serta semua teman – teman angkatan 2014 yang telah memberikan semangat, dorongan dan bantuan hingga selesai skripsi ini, kebersamaan yang indah selama kita kuliah..

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Persampahan Organik dan Anorganik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat”**. Skripsi adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar.

Selama penyusunan skripsi ini, peneliti tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Jasman J Ma'ruf, MBA, selaku Rektor Universitas Negeri Teuku Umar (UTU).
2. Bapak Prof. Dr. drh. Darmawi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Teuku Umar (FKM-UTU).
3. Bapak Fitrah Reynaldi, SKM, M.Kes, selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Teuku Umar
4. Bapak Zakiyuddin, SKM, M.Kes selaku pembimbing yang telah yang telah memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Darmawan, SKM, M.Kes sebagai penguji I dan Ibu Siti Maisyaroh Fitri S, , SKM, M.Kes sebagai penguji II yang telah memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah membesarkan dan mendidik ananda, sehingga menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
7. Seluruh dosen dan staf pengajar serta civitas akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Teuku Umar yang telah memberikan dorongan serta saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kejanggalan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa mendatang.

Alue Peunyareng, 20 Desember 2021

Peneliti

ABSTRAK

TEUKU AFRIZAL. 1405902010050. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Persampahan Organik dan Anorganik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat”. Dibawah bimbingan Bapak Zakiyuddin.

Implementasi adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan kebijakan pemerintah untuk menimbulkan dampak terhadap penanganan persampahan. Berdasarkan survey awal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat kepada petugas bahwa komunikasi antara staf yang kurang terjalin mengenai program penanganan sampah dimana kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat, sumber daya yang kurang bekerja sama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Persampahan Organik dan Anorganik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Menggunakan 1 informan utama yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 1 informan kunci yaitu Kabid pelayanan, 3 informan pendukung yaitu staf Dinas Lingkungan Hidup, Pelaksana pekerja lapangan Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat. Pengumpulan data dengan dua cara yaitu wawancara mendalam dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi masih terjadinya kendala, sumber daya yang cukup tetapi kinerja yang masih berbeda-beda, disposisi atau sikap staf yang belum maksimal, dan struktur birokrasi dilakukan sesuai dengan qanun dan peraturan. Kesimpulannya menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap yang masih belum maksimal pelaksanaannya dan struktur birokrasi yang sesuai dengan peraturan. Disarankan bagi pemangku kebijakan dimana kebijakan pengelolaan sampah di perkotaan dengan melibatkan masyarakat, badan usaha, atau instansi pemerintah lain perlu dilakukan di daerah sehingga permasalahan sampah dapat dicegah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, Birokrasi

ABSTRACT

TEUKU AFRIZAL. 1405902010050. *Implementation of Government Policy in Handling Organic and Inorganic Waste at the Environmental Service of West Aceh Regency*". Under the guidance of Mr. Zakiyuddin.

Implementation is to provide a means to implement government policies to have an impact on solid waste management. Based on an initial survey at the Environmental Service of Aceh Barat Regency to officers that communication between staff is lacking regarding waste management programs where there is a lack of socialization and outreach to the community, resources are less cooperative. The purpose of this study was to determine the implementation of government policies in handling organic and inorganic waste. This type of research is descriptive qualitative. Using 1 main informant, namely the Head of the Environmental Service, 1 key informant, namely the Head of Service, 3 supporting informants, namely the staff of the Environmental Service, Implementing field workers of the Environmental Service and the community. Data collection in two ways, namely in-depth interviews and observations. The results of the study indicate that there are still problems with communication, sufficient resources but different performance, the disposition or attitude of the staff is not optimal, and the bureaucratic structure is carried out in accordance with qanuns and regulations. The conclusion shows that the implementation of communication, resources, disposition or attitude is still not optimal and the bureaucratic structure is in accordance with the regulations. It is recommended for the policy makers that waste management policies in urban areas by involving the community, business entities, or other government agencies need to be carried out in the area so that waste problems can be prevented in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Communication, Resources, Attitude, Bureaucracy*

BIODATA

A. Biodata Diri

Nama : TEUKU AFRIZAL
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Cot Seumeureung, 02 April 1996
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Anak Ke : Dua
Alamat Rumah : Desa Cot Seumeureung, Kecamatan Samatiga,
Kabupaten Aceh Barat

B. Biodata Orang Tua / Wali :

Nama Ayah : T.R Leman
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Rusmala
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Rumah : Desa Cot Seumeureung, Kecamatan Samatiga,
Kabupaten Aceh Barat

C. Pendidikan Formal

(2002-2008) : SD Negeri 1 Bubon
(2008-2011) : MTs. Negeri Blang Bole
(2011-2014) : MAN Suak Timah
(2014-2021) : Peminatan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Teuku Umar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PESETUJUAN KOMISI UJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BIODATA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Praktis	8
1.4.2 Manfaat Teoritis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Implementasi	9
2.1.1 Pengertian Implementasi	9
2.2 Pengertian Sampah.....	16
2.2.1 Sampah Organik.....	17
2.2.2. Sampah Anorganik.....	17
2.3 Pengelolaan Sampah	19
2.3.1. Pengumpulan Sampah.....	20
2.3.2. Pemisahan	21
2.3.3. Pembakaran (insinerasi)	21
2.3.4. Pembuangan (penimbunan) Sampah.....	21
2.4 Aspek Pengelolaan Sampah	23
2.4.1 Aspek Teknis Operasional	24
2.4.2 Aspek Kelembagaan.....	29
2.4.3 Aspek Pembiayaan	31
2.4.4 Aspek Peraturan	33
2.4.5 Aspek Peranserta Masyarakat	34
2.5 Pengelolaan Sampah dengan 3R	38
2.6 Standar Operasional Prosedur Persampahan.....	39
2.7 Kerangka Teori.....	41

2.8 Alur Pikir.....	42
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian	43
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.3 Informan	43
3.4 Metode Pengumpulan Data	44
3.4.1 Data Primer	44
3.4.2 Data Sekunder	45
3.5 Definisi Istilah.....	45
3.6 Instrumen Penelitian.....	46
3.7 Pengolahan Data dan Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum	48
4.2 Hasil Penelitian	50
4.3 Pembahasan.....	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Beberapa Contoh Sumber dan Komposisi Sampah	24
Tabel 3.1	Definisi Istilah	45

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 2.1	: Kerangka Teori	41
Gambar 2.2	: Alur Pikir	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian sederhana istilah sampah adalah padatan yang sudah tidak terpakai lagi dan dibuang. Sampah dapat berasal dari kegiatan kita sehari-hari atau berasal dari industri, tempat-tempat komersial, pasar, taman dan kebun, dsb. Dari kandungan materinya, sampah dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik (sampah yang berasal dari bagian hewan, tumbuhan dan manusia) dan sampah anorganik (sampah yang berasal dari bahan mineral seperti logam, kaca, plastik, dsb). (Wahyono, 2016)

Setiap hari kita tidak dapat lepas dari sampah, karena kita membuangnya baik di rumah atau di kantor dan dimanapun kita berada sehingga akan menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara. Salah satu pilar pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah komitmen pada lingkungan hidup, yang berarti diperlukan penanganan pengelolaan sampah yang tetap berazaskan pada kelestarian lingkungan hidup, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup diupayakan seminimal mungkin. Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya untuk melakukan pengelolaan sampah diwilayahnya melalui instansi pelaksana dibidang kebersihan, namun pengelolaan tersebut masih menggunakan cara-cara yang konvensional serta dilaksanakan tanpa melakukan integrasi pengelolaan yang komprehensif. (Sari dan Rustan, 2016)

Sampah organik mengandung berbagai macam zat seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dsb. Secara alami, zat-zat tersebut mudah

terdekomposisi oleh pengaruh fisik, kimia, enzim yang dikandung oleh sampah itu sendiri dan enzim yang dikeluarkan oleh organisme yang hidup di dalam sampah. Proses dekomposisi sampah organik yang tidak terkendali umumnya berlangsung tanpa oksigen. Dari proses ini timbul gas-gas seperti H₂S dan CH₄ yang baunya menyengat sehingga proses ini dikenal sebagai proses pembusukan. Dari proses ini timbul pula *leachate* (air lindi) yang dapat menyebabkan pencemaran air tanah dan permukaan. Sampah yang membusuk juga merupakan sumber penyakit seperti bakteri, virus, protozoa, maupun cacing (Wahyono, 2016)

Sampah berdampak pada kesehatan, lingkungan dan sosial ekonomi dimana sampah menjadi tempat pembiakan lalat dan disenangi tikus sehingga mendorong penularan infeksi seperti sakit perut dan diare. Sampah menurunkan kualitas lingkungan, estetika terganggu karena bau dan berserakan (Annihayah. 2017)

Pengelolaan sampah perkotaan dilakukan dengan dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Pengelolaan sampah Perkotaan ditangani sebagian besar oleh pemerintah secara sentralisasi. Pengelolaan tersebut mulai dari penarikan retribusi, pengumpulan dari sumber, pengumpulan di TPS, dan pengangkutan ke TPA (Annihayah. 2017)

Prosedur penanganan sampah yang umum dilaksanakan oleh daerah perkotaan saat ini adalah dengan metode 3P (pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan). Sampah dikumpulkan dari sumbernya dan diangkut ke tempat penampungan sementara (TPS) lantas diangkut lagi ke tempat pembuangan akhir (TPA) (Wahyono, 2016)

Pemilahan sampah merupakan pemisahan sampah berdasarkan karakteristiknya yang meliputi sampah organik dan anorganik. Sedangkan perlakuan terhadap sampah merupakan kegiatan daur ulang sampah terutama untuk sampah organik menjadi kompos. Perbedaannya terletak pada: 1) tahapan proses dan pelaku yang terlibat dalam sistem pengelolaan; 2) bentuk dan pendekatan dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah. (Utami, et al. 2017)

Dampak yang tidak langsung dari timbulan sampah berupa penyakit bawaan vektor yang berkembang biak dalam sampah, selain itu juga menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah bila ditimbun sembarangan akan digunakan lalat sebagai sarang. Seperti diketahui, lalat adalah vektor berbagai penyakit perut yang hinggap dimakanan dan dimakan manusia, lalat juga merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat, yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan seperti: kolera, disentri, typhus. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi melalui semua bagian dari tubuh lalat seperti: bulu badan, bulu pada anggota gerak, muntahan serta fecesnya. (Praditya, 2018)

Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut: a) Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah (*haemorrhagic fever*) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. b) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit). c) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang ditularkan

oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah. (Gelbert dkk, 2017)

Menurut WHO (*World Health Organization*), sampah merupakan suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan Negara dengan pengelolaan sampah terbaik dunia yang mendaur ulang sampahnya menurut *World Economic Forum* tahun 2017 yaitu Jerman sebanyak 56,1 persen, Austria sebanyak 53,8 persen, Korea Selatan sebanyak 53,7 persen, Wales sebanyak 52,2 persen dan Swiss sebanyak 49,7 persen (WHO, 2017).

Berdasarkan data BPS tahun 2011, tingkat pelayanan sampah secara nasional saat ini hanya mencapai kurang lebih 40%, dengan kualitas pelayanan yang belum memadai. Kondisi tersebut masih jauh dari standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan yaitu 60% dengan pelayanan pengumpulan/pengangkutan minimal seminggu 2 kali (Kemen PUPR RI, 2011). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa pada 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kilogram sampah per hari. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2020)

Berdasarkan data provinsi Aceh bahwa jumlah timbulan sampah Kab/kota 2011-2019 sebanyak 8,768.33 persen. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup di Aceh Barat pada tahun 2020 jumlah sampah penanganan sampah di kabupaten

Aceh Barat baru mencapai 40%, dimana prediksi sampah diperkirakan sesuai dengan jumlah penduduk Aceh Barat sebanyak 69.231 jiwa tahun 2020, maka volume sampah sebanyak 173 m³ perhari dengan rencana penanganan sampah sarana sebanyak 15 armada truck, amrol 5 unit, L-300 6 unit, becak 110 unit yang angkut sampah dan kenyataan dilapangan sarana masih kurang dari yang diharapkan. Sampah yang diangkut hanya seputaran kota yaitu Kecamatan Johan Pahlawan tetapi belum sepenuhnya melakukan implementasi perbedaan sampah organik dan anorganik.

Berdasarkan survey awal pada Bulan Maret tahun 2021 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat kepada petugas mengatakan mengenai poin dalam penelitian ini bahwa komunikasi antara staf di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat dan staf dilapangan yang kurang terjalin mengenai program penanganan sampah hingga dampaknya kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat, sumber daya yang kurang bekerja sama dimana pegawai yang bekerja dalam penyelesaian mengenai sampah masih belum terstruktur dengan baik dan hanya diberikan sanksi ringan apabila tidak sesuai dengan tanggung jawabnya, serta struktur birokrasi yang berjalan sesuai SOP hanya saja berbeda saat pelaksanaan dilapangan, dan sikap petugas yang terkadang belum melaksanakan penanganan sampah dengan tuntas karena petugas merasa bahwa permasalahan sampah bukan permasalahan yang terpenting sehingga dampaknya penanganan sampah belum sesuai harapan yang diinginkan.

Persoalan dasarnya adalah belum adanya kebijakan yang menyeluruh dan konsisten dalam pengelolaan dan penanganan sampah yang terintegrasi. Kenyataan lain adalah bahwa permasalahan sampah masih dianggap hal yang

tidak penting dibandingkan dengan masalah lainnya. Pemerintah kota baru kalang kabut kalau sudah terjadi permasalahan sampah yang ruwet dan sulit dicari pemecahannya. Sehingga apabila pelaksanaan sampah belum maksimal maka menyebabkan penyakit menular dan pemicu kerusakan lingkungan lainnya. Penyebab pengelolaan sampah yang buruk memang tidak semua dari penetapan kebijakan saat pelaksanaan kebijakan tersebut masih ada yang belum sesuai dengan seharusnya yang terkadang datang dari sikap petugasnya sendiri, komunikasinya bahkan dalam menangani masyarakat tersendiri untuk menaati peraturan yang ada.

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka ini yang menjadi alasan peneliti untuk mengangkat judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Persampahan Organik dan Anorganik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bagaimana “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Persampahan Organik dan Anorganik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Persampahan Organik dan Anorganik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis Komunikasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Persampahan Organik dan Anorganik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat
2. Untuk menganalisis Sumber daya Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Persampahan Organik dan Anorganik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat
3. Untuk menganalisis disposisi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Persampahan Organik dan Anorganik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat
4. Untuk menganalisis struktur birokrasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Persampahan Organik dan Anorganik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi pihak pemangku kebijakan sebagai bahan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Persampahan Organik dan Anorganik
2. Bagi pihak petugas menjadi masukan agar dapat ikut serta melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dalam melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan

Persampahan Organik dan Anorganik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar sebagai salah satu bahan masukan atau informasi guna menambah bahan perpustakaan yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Bagi pihak lain diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk dipelajari dibangku perkuliahan, dan dapat membandingkan antara teori dengan praktek yang sesungguhnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

2.1.1 Implementasi

Implementasi sebagai suatu konsep tindak lanjut pelaksanaan kegiatan cukup menarik untuk dikaji oleh cabang cabang ilmu. Hal ini semakin mendorong perkembangan konsep implementasi itu sendiri, disamping itu juga menyadari bahwa dalam mempelajari implementasi sebagai suatu konsep akan dapat memberikan kemajuan dalam upaya-upaya pencapaian tujuan yang telah diputuskan (Sunarto, 2017).

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2016) dalam bukunya adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar *webster*, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” Sehingga menurut Webster dalam Wahab (2016), Implementasi adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu untuk menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Wahab (2016).

Definisi yang lain menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983) dalam buku Hill dan Hupe (2017) sebagaimana dikutip peneliti, bahwa: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya,

keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. Hill dan Hupe (2017)

Menurut Syukur Abdullah (1988) dalam Novayanti (2017) bahwa pengertian dan unsur unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut:

1. Proses implementasi ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.
2. Proses implementasi dalam kenyataanya yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai “*outcomes*” unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program.
3. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu :
 - a. Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya, dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program program pembangunan pada umumnya (Novayanti, 2017).
 - b. Target group yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut.
 - c. Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan.

- d. Unsur pelaksanaan atau implementer, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi tersebut.

Menurut Wahab (2016), sesuai kamus Webster merumuskan *to implement* (mengimplementasikan) yang berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu) termasuk tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edward III dalam Wahab (2016) sebagai berikut :

1. Komunikasi

Istilah ‘komunikasi’ (*communication*) berasal dari bahasa Latin ‘*communicatus*’ yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Dengan demikian komunikasi menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. (Wahab, 2016).

Secara harfiah, komunikasi berasal dari Bahasa Latin: “*Communis*” yang berarti keadaan yang biasa, membagi. Dengan kata lain, komunikasi adalah satu proses di dalam upaya membangun saling pengertian. Dalam suatu organisasi biasanya selalu menekankan bagaimana pentingnya sebuah komunikasi antar anggota organisasi untuk menekan segala kemungkinan kesalahpahaman yang bisa saja terjadi. (Wahab, 2016).

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan

kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors (pelaksana implementasi) mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya (Lilliweri, 2017).

Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan (Wahab, 2016).

2. Sumber daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana (Lilliweri, 2017).

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai tentang dunia kesehatan (Wahab, 2016).

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga

menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada (Wahab, 2016).

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan (Lilliweri, 2017).

3. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah (Lilliweri, 2017).

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini

adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program (Lilliweri, 2017).

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- b) Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
- c) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
- d) Vitalitas suatu organisasi;
- e) Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;

f) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. (Wahab, 2016).

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi (Wahab, 2016).

2.2 Pengertian Sampah

Sampah didefinisikan sebagai semua bentuk limbah berbentuk padat yang berasal dari kegiatan manusia dan hewan kemudian dibuang karena tidak bermanfaat atau keberadaannya tidak diinginkan lagi. (Tchobanoglus, 2017) Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan lagi tentang definisi sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Menurut Suprihatin, A., D. Prihanto dan M. Gelbert. (2017), sampah dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

2.2.1 Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang mudah diuraikan dalam proses salami. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain.

Sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Sampah ini dapat terurai dengan mudah dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar adalah sampah organik. Contoh sampah organik adalah sampah dari dapur, sayuran, kulit buah, dan daun. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari sumber daya alam yang tidak terbarui, seperti mineral dan sisa-sisa hasil produksi. Secara keseluruhan, sebagian dari zat anorganik tidak dapat diuraikan oleh alam. Sedangkan sebagian lainnya lagi dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Contoh sampah anorganik adalah botol gelas, kaleng, dan logam (Gelbert, 2017)

2.2.2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari sumber daya yang tidak diperbaharui. Secara keseluruhan zat anorganik yang ada tidak dapat diuraikan oleh alam. Jenis sampah ini dapat berupa botol kaca, botol plastik, kaleng, kayu, tulang, dan kertas (kayu, tulang kertas diuraikan dalam jangka waktu relatif lama karena pada dasarnya kayu, tulang, kertas merupakan sampah organik tapi cara penanganannya sama seperti sampah anorganik). Pada setiap

kegiatan yang menggunakan sumberdaya, sampah selalu dihasilkan. Sampah terkumpul didalam lingkungan dan sangat tergantung pada kemampuan lingkungan untuk menghasilkannya, jumlah sampah akan semakin bertambah dan tidak sepenuhnya dapat diserap oleh lingkungan. (Gelbert, 2017)

Menurut Hadiwiyoto (2017), ditinjau dari segi keseimbangan lingkungan, kesehatan, keamanan dan pencemaran, sampah dapat menimbulkan gangguan sebagai berikut tumpukan sampah dapat menimbulkan kondisi fisik dan kimia yang tidak sesuai dengan lingkungan yang normal, biasanya dapat menyebabkan kenaikan suhu dan perubahan pH tanah. Keadaan ini dapat mengganggu kehidupan sekitarnya. Sampah dapat menimbulkan pencemaran udara karena selama proses pembusukan menghasilkan gas-gas beracun, bau tak sedap, daerah becek, dan lumpur terutama pada musim penghujan. Akan terjadi kekurangan O₂ di tempat pembuangan sampah, keadaan ini disebabkan karena selama proses perombakan sampah menjadi senyawa sederhana diperlukan O₂ yang diambil di udara sekitarnya sehingga mengganggu kehidupan flora dan fauna sekitar. Tumpukan sampah menjadi media berkembang biaknya hewan pembawa penyakit terutama lalat, serangga, tikus dan anjing. Secara estetika sampah dapat digolongkan sebagai bahan yang dapat mengganggu pemandangan dan keindahan lingkungan.

Soemirat (2017), menyatakan bahwa kuantitas dan kualitas sampah sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi sampah antara lain:

a. Jumlah penduduk.

Bahwa dengan semakin banyak penduduk, maka akan semakin banyak pula sampah yang dihasilkan oleh penduduk.

b. Keadaan sosial ekonomi.

Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita sampah yang dibuang tiap harinya. Kualitas sampahnya pun semakin banyak yang bersifat non organik atau tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan.

c. Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam dapat mempengaruhi jumlah dan jenis sampahnya.

2.3 Pengelolaan Sampah

Menurut Syamsuddin (2017) sampah dapat digolongkan menjadi beberapa golongan. Adapun penggolongan yang dimaksud adalah penggolongan sampah berdasarkan asalnya (sampah dari hasil kegiatan rumah tangga, sampah dari kegiatan industri/pabrik, sampah dari kegiatan perdagangan, sampah dari hasil pembangunan, sampah jalan raya), sampah berdasarkan komposisinya (sampah yang seragam, berasal dari kertas, kertas karbon dan sampah yang tidak seragam berasal dari tempat-tempat umum), penggolongan sampah berdasarkan bentuknya (sampah padat, sampah cair dan sampah gas), penggolongan sampah

berdasarkan lokasi (sampah kota dan sampah luar kota), penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya (sampah alami dan sampah non alami), penggolongan sampah berdasarkan sifatnya (organik dan anorganik), berdasarkan jenisnya (sampah makanan, sampah kebun/pekarangan, sampah kertas, sampah plastik, karet, kulit, kain, kayu, logam, gelas keramik, abu dan debu).

Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja yang tertentu. Dari limbah yang dihasilkan dapat dilakukan penanganan dengan beberapa kemungkinan yaitu didaur ulang menjadi bahan baku pada suatu proses produksi (kertas, karton, plastik, logam, botol dan sebagainya), diolah menjadi kompos (umumnya dari jenis sampah organik), ditumpuk di tempat pembuangan sampah akhir (Prajudi, 2016).

Rencana pengelolaan sampah yang baik harus memperhatikan sumber sampah, lokasi, pergerakan/peredaran, dan interaksi peredaran sampah dalam suatu lingkungan wilayah. Penanganan sampah yang tepat, selain dapat menjadi jalan keluar dari masalah keterbatasan lahan untuk penumpukan/pembuangan sampah, juga dapat memberikan manfaat atau nilai ekonomis. Menurut Hadiwiyoto (2017), penanganan sampah dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

2.3.1. Pengumpulan Sampah

Sampah yang akan dibuang atau dimanfaatkan harus dikumpulkan terlebih dahulu dari berbagai tempat asalnya.

Pengumpulan sampah dilakukan dengan pengambilan sampah dari bak sampah milik masyarakat, kemudian dengan menggunakan kendaraan-kendaraan pengangkut sampah dipindahkan ke lokasi pembuangan akhir.

2.3.2. Pemisahan

Pemisahan adalah memisahkan jenis-jenis sampah baik berdasarkan sifatnya, maupun berdasarkan jenis dan keperluannya.

2.3.3. Pembakaran (insinerasi)

Pembakaran dilakukan pada suatu instalasi pembakaran, karena dapat diatur prosesnya sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Pembakaran insenerator adalah pembakaran untuk pengendali polusi udara, sampah dibakar secara terkendali dan berubah menjadi gas (asap) dan abu.

2.3.4. Pembuangan (penimbunan) Sampah

Pembuangan (penimbunan) sampah adalah menempatkan sampah pada suatu tempat yang rendah kemudian menimbunnya dengan tanah (Hadiwiyoto, 2017)

Menurut Ismawati (2016) penanganan sampah dengan cara pembakaran mengakibatkan kerugian-kerugian antara lain membangkitkan pencemaran, mengancam kesehatan masyarakat memberi beban finansial yang cukup berat bagi masyarakat yang berada disekitar lokasi insinerator, menguras sumber daya finansial masyarakat setempat, memboroskan energi dan sumberdaya material, mengganggu pembangunan ekonomi setempat, meremehkan upaya minimisasi sampah dan pendekatan-pendekatan rasional dalam pengelolaan sampah, memiliki pengalaman operasional bermasalah di negara-negara industri, seringkali melepaskan polusi ke udara yang melebihi standar/baku mutu, menghasilkan abu yang beracun dan berbahaya, dan dapat terancam bangkrut apabila jumlah kapasitas sampah yang disetorkan kurang dari perkiraan awal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis,

menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

- a. Pembatasan timbulan sampah;
- b. Pendaauran ulang sampah;
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Dalam Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dikatakan bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Selain perorangan, produsen juga wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara:

- a. Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya.
- b. Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Menurut Dirjen Cipta Karya (2017), pengelolaan sampah dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Penanganan Setempat

Penanganan setempat dimaksudkan penanganan yang dilaksanakan sendiri oleh penghasil sampah dengan menanam dalam galian tanah pekarangannya atau dengan cara lain yang masih dapat dibenarkan. Hal ini dimungkinkan bila daya dukung lingkungan masih cukup tinggi misalnya tersedianya lahan, kepadatan penduduk yang rendah, dan lain-lain.

2. Pengelolaan Terpusat

Pengelolaan persampahan secara terpusat adalah suatu proses atau kegiatan penanganan sampah yang terkoordinir untuk melayani suatu wilayah / kota. Pengelolaan sampah secara terpusat mempunyai kompleksitas yang besar karena cakupan berbagai aspek yang terkait. Aspek – aspek tersebut dikelompokkan dalam 5 aspek utama, yakni aspek institusi, hukum, teknis operasional, pembiayaan dan retribusi serta aspek peranserta masyarakat.

2.4 Aspek Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (2017) aspek pengelolaan sampah perkotaan terdiri atas 5 aspek yaitu:

1. Aspek teknis operasional,
2. Aspek kelembagaan
3. Aspek hukum
4. Aspek pembiayaan
5. Aspek peran serta masyarakat

2.4.1 Aspek Teknis Operasional

1) Komposisi Sampah

Komposisi sampah sangat menentukan sistem penanganan yang dapat dilakukan terhadap sampah. Komposisi menentukan jenis dan kapasitas peralatan, sistem, dan program penanganannya. Komposisi sampah adalah setiap komponen sampah yang membentuk suatu kesatuan, dalam persentase (%). Komposisi sampah berbeda-beda berdasarkan sumber sampah, karakteristik perilaku masyarakat serta kondisi ekonomi yang berbeda dan proses penanganan sampah di sumber sampah. Pada tabel 2.1 dapat dilihat komposisi sampah berdasarkan sumber sampah dan komposisi sampah dari masing-masing sumbernya.

Tabel 2.1 Beberapa Contoh Sumber dan Komposisi Sampah

No	Sumber Sampah	Komposisi Sampah
1.	Kantor	Kertas karton plastik cartridge printer bekas sampah makanan
2.	Rumah Sakit	Kertas kapas bekas plastik (pembungkus spuit, spuit bekas) kaca (botol obat, pecahan kaca) logam (jarum spuit) perban bekas potongan jaringan tubuh sisa-sisa obat sampah makanan

3.	Pasar	sampah organik mudah membusuk plastik kertas / karton, karet, kain kayu pengemas
4.	Rumah Makan	sampah makanan kertas pembungkus plastik pembungkus
5.	Lapangan Olahraga	Kertas plastik sampah makanan potongan rumput
6.	Lapangan Terbuka	ranting/daun kering potongan rumput
7.	Jalan dan Lapangan	Kertas plastik daun kering
8.	Rumah Tangga	sampah makanan kertas / karton plastik, logam kain daun, ranting
9.	Pembangunan Gedung	pecahan bata pecahan beton pecahan genting kayu kertas plastic

Sumber : (Dirjen Cipta Karya, 2017)

Selain itu, komposisi sampah akan berbeda untuk setiap kota atau negara, tergantung kondisi ekonomi suatu kota atau negara yang bersangkutan. Pada umumnya makin tinggi tingkat perekonomian suatu kota atau negara, komposisi organik akan makin menurun dan komposisi non organik (kertas, plastik) akan meningkat (Dirjen Cipta Karya, 2017).

Komposisi juga akan mempengaruhi pola penanganan sampah terutama penanganan pada sumber sampah. Sebagai contoh jika sampah mengandung banyak bahan organik pada pengelolaan pada sumber sampah akan lebih mudah jika dilakukan pemisahan sampah organik dan anorganik serta adanya proses pengomposan yang sederhana (Dirjen Cipta Karya, 2017).

2) Karakteristik Sampah

Karakteristik sampah secara umum dibedakan atas :

1. Karakteristik fisik

- Kandungan kadar air
- *Specific Weight* / Berat Jenis (berat/volume; kg/liter, lb/ft³)
- Ukuran partikel dan distribusi partikel
- *Field Capacity*, didefinisikan sebagai jumlah total air yang dapat ditahan oleh sampah secara gravitasi
- Permeabilitas sampah, sangat penting untuk mengetahui pergerakan cairan dan gas dalam landfill.

2. Karakteristik kimiawi

- *Proximate Analysis*: Analisis terhadap kelembaban sampah, kandungan volatile di dalam sampah, *fixed carbon*, dan *ash* di dalam sampah.
- *Fusing point of ash*: Temperatur dimana bisa terbakar sebagai abu (clinker) suhu diatas 1000oC
- *Ultimate Analysis*: Analisis terhadap unsur-unsur kimia penyusun sampah. Sampah mengandung komponen karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan ash. Analisis ini sangat menentukan sistem pengolahan sampah yang efektif digunakan untuk memusnahkan sampah.
- *Energy content (Btu/lb)*: Analisis kandungan energi dalam sampah. Sampah mengandung unsur karbon yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Beberapa jenis sampah yang mempunyai nilai kalor tinggi seperti kayu, serbuk gergaji dan lainnya dapat digunakan sebagai sumber energi. *Bomb calorimeter*

dapat digunakan untuk menentukan nilai kalor dari masing-masing komponen sampah.

3. Karakteristik biologi

Biodegradability adalah kemampuan sampah untuk diuraikan dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme. Produksi bau pada proses penguraian sampah oleh mikroorganisme. Bau timbul akibat Dirjen Cipta Karya, 2017)

3) Sumber Sampah

Sumber sampah sebagaimana dijelaskan dalam UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. Sampah rumah tangga: sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga: sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- c. Sampah spesifik:
 - Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
 - Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun
 - Sampah yang timbul akibat bencana
 - Bongkaran bangunan
 - Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah
 - Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Ada beberapa kategori sumber sampah yang dapat digunakan sebagai acuan klasifikasi sumber sampah, yaitu:

1) Sumber sampah yang berasal dari daerah perumahan

Sumber sampah didaerah perumahan dibagi atas :

1. Perumahan masyarakat berpenghasilan tinggi (*High income*)
2. Perumahan masyarakat berpenghasilan menengah (*Middle income*)
3. Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah / daerah kumuh (*Low income / slum area*)

2) Daerah komersial

Daerah komersial umumnya didominasi oleh kawasan perniagaan, hiburan dan lain-lain. Yang termasuk kategori komersial adalah pasar pertokoan hotel restoran bioskop salon kecantikan, industri dan lain-lain.

3) Fasilitas umum

Fasilitas umum merupakan sarana / prasarana perkotaan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Yang termasuk dalam kategori fasilitas umum ini adalah perkantoran, sekolah, rumah sakit, apotik, gedung olah raga, museum, taman, jalan, saluran / sungai dan lain-lain.

4) Fasilitas sosial

Fasilitas sosial merupakan sarana prasarana perkotaan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau bersifat sosial. Fasilitas sosial ini meliputi panti-panti sosial (rumah jompo, panti asuhan) dan tempat-tempat ibadah (masjid, gereja pura, dan lain-lain).

5) Sumber lain

Dari klasifikasi sumber-sumber sampah tersebut, dapat dikembangkan lagi jenis sumber-sumber sampah yang lain sesuai dengan kondisi kotanya atau peruntukan tata guna lahannya. Sebagai contoh sampah yang berasal dari tempat pemotongan hewan atau limbah pertanian ataupun buangan dari

instalasi pengolahan air limbah (sludge), dengan catatan bahwa sampah atau limbah tersebut adalah bersifat padat dan bukan kategori sampah B3.

Klasifikasi kategori sumber sampah tersebut pada dasarnya juga dapat menggambarkan klasifikasi tingkat perekonomian yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi sampah dan menentukan pola subsidi silang.

2.4.2 Aspek Kelembagaan

Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti badan (organisasi) yg tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Menurut Ruttan dan Hayami (1984) dalam Utami (2016), kelembagaan berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Scott (2001) dalam Saraswati (2016), institusi atau lembaga memiliki tiga pilar yaitu sistem regulasi, sistem norma dan sistem kultur kognitif. Pilar regulatif bermakna institusi menjaga dan mengatur perilaku. Proses regulasi meliputi penetapan peraturan, pemeriksaan, penentuan sanksi dalam rangka mempengaruhi perilaku di masa datang. Pilar normatif terdiri atas nilai dan norma serta meliputi dimensi ketentuan (*prescriptive*), penilaian (*evaluative*) dan kewajiban (*obligatory*) dalam kehidupan sosial. Pilar kultur kognitif dari institusi adalah dengan menjembatani antara dunia luar dari stimulus dan respons dari individu.

Menurut Wiryanto (1986) dalam Utami (2017), ada tiga jenis dasar dari lembaga yaitu: Lembaga Sistem Otoriter, terdapat dua tingkatan kedudukan,

atasan dan bawahan. Atasan bertugas untuk membina dan menguasai yang lain, suka maupun tidak suka, biasanya ditentukan oleh keturunan, kekayaan, umur, pendidikan, kedudukan/kemampuan, hal ini menyebabkan atasan memutuskan segala sesuatu sendiri; Lembaga Sistem Demokrasi, semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang, pemimpin berfungsi sebagai yang satu dari yang sama; Lembaga Sistem “Biarkan Saja” (*laissez faire*) semua anggota sama tingkat kedudukan dan fungsi sehingga menyebabkan pemimpin tidak memiliki arti dan tidak mempunyai fungsi (Utami (2017)).

Dikaitkan dengan lingkungan, menurut Muller-Glode (1994) dalam Saraswati (2016), kelembagaan lingkungan (*environmental institution*) merupakan norma dan nilai sosial, kerangka politis, program-program lingkungan, pola perilaku dan komunikasi serta pergerakan sosial yang memberntuk interaksi sosial dari individu-individu yang menyusun organisasi dan kelompok secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi peraturan yang mengatur sumberdaya alam.

Berdasarkan Dirjen Cipta Karya (2017), beberapa kondisi pengelolaan sampah perkotaan yang berkaitan dengan aspek institusi atau kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar institusi pengelola adalah berbentuk dinas, suku dinas, seksi, sub seksi dimana belum ada pemisahan antara operator dan regulator
2. Struktur organisasi yang ada belum ditunjang dengan kapasitas (jumlah dan kualitas SDM) yang memadai sesuai dengan kewenangannya
3. Tata laksana kerja belum jelas antara bagian administrasi dan pelaksana teknis lapangan, termasuk kewenangan penarikan retribusi serta pengalokasian

anggaran untuk pendanaan invesrasi 4. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait yang ada di lapangan

Kelembagaan yang diharapkan dalam pengelolaan sampah adalah kelembagaan yang sesuai dengan amanat PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PP 41/2007 tentang Pemerintahan Daerah, PP 23/2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta Permendagri 61/2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Perangkat peraturan tersebut di atas digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kelembagaan pengelolaan sampah, antara lain:

1. Memisahkan regulator dan operator pengelola sampah, misalnya membentuk UPTD atau kerjasama dengan swasta sebagai operator
2. Peningkatan kualitas SDM melalui training dan rekrutmen SDM untuk jangka panjang sesuai dengan kualifikasi bidang keahlian persampahan/manajemen karena struktur organisasi mencerminkan tugas dan tanggungjawab yang jelas dalam kegiatan-kegiatan penanganan sampaj yang harus senantiasa ditunjang dengan kapasitas serta kualitas SDM yang memadai (Dirjen Cipta Karya, 2017)

2.4.3 Aspek Pembiayaan

Menurut Dirjen Cipta Karya (2017), beberapa kondisi yang berkaitan dengan aspek pembiayaan pengelolaan sampah perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan biaya, termasuk sumber pendanaan untuk investasi dan operasi atau pemeliharaan mengakibatkan pelayanan pengelolaan sampah yang tidak optimal

2. Belum adanya paradigma Pemerintah Daerah (Pemda) bahwa pengelolaan sampah adalah suatu sumberdaya
3. Belum terciptanya iklim yang kondusif untuk kerja sama dengan swasta (berdasarkan Perpres No.13 Tahun 2010 tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur)
4. Tarif/retribusi sampah belum didasarkan pada perhitungan dan pendataan (klasifikasi wajib retribusi) yang memadai dan realisasi penarikan retribusi masih rendah (rata-rata nasional=20%)

Pembiayaan yang diharapkan dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

1. Investasi yang lebih memadai yang didasarkan pada kebutuhan dan peningkatan sarana prasarana, kapasitas SDM serta kampanye dan edukasi bidang persampahan
2. Biaya operasi dan pemeliharaan yang mencukupi untuk kebutuhan pengoperasian sarana prasarana persampahan yang penghitungannya didasarkan pada kebutuhan alternatif pengoperasian seluruh kegiatan penanganan sampah dari sumber sampai TPA untuk jangka panjang
3. Tarif/retribusi yang disusun berdasarkan struktur/klasifikasi wajib retribusi (cross subsidi), kemampuan daerah, kemampuan masyarakat yang dapat mencukupi kebutuhan operasional pengelolaan sampah (mengarah pada pola *cost recovery*)
4. Penerapan pola insentif dan disinsentif bagi para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan persampahan

5. Pendapatan dari penarikan tarif retribusi harus terkoordinasi dan tercatat baik dan transparan serta diinvestasikan kembali untuk kepentingan pengelolaan sampah (Dirjen Cipta Karya, 2017)

2.4.4 Aspek Peraturan

Menurut Dirjen Cipta Karya (2017), beberapa kondisi yang terkait dengan aspek peraturan pengelolaan sampah perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Beberapa daerah belum memiliki perda terkait institusi, retribusi dan ketentuan penanganan persampahan
2. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai perda persampahan
3. Belum adanya penerapan sanksi atas pelanggaran bidang persampahan

Hukum dan peraturan yang diharapkan dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah memiliki perda yang terdiri dari perda pembentukan institusi, perda ketentuan penanganan persampahan dan perda retribusi, dimana substansi materi perda harus cukup menyeluruh, tegas dan dapat diimplementasikan untuk jangka panjang (20 tahun)
2. Penerapan perda tersebut perlu didahului dengan sosialisasi, uji coba di kawasan tertentu dan penerapan secara menyeluruh. Selain itu juga diperlukan kesiapan aparat dari mulai kepolisian, kejaksaan dan kehakiman untuk penerapan sanksi atas pelanggaran yang terjadi

Indonesia memiliki undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri sebagai regulasi di tingkat nasional yang kemudian dirinci lagi dalam rangka implementasi di masing-masing daerah dan diatur dalam peraturan daerah.

Berikut adalah beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan sampah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah, hak dan kewajiban masyarakat, perizinan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan dan kompensasi, kerjasama dan kemitraan, serta peran serta masyarakat terhadap pengelolaan persampahan.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. Peraturan ini membahas tentang isu, permasalahan serta tantangan pengelolaan persampahan dan mengatur strategi serta kebijakan dalam mengelola sampah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Permen Dalam Negeri ini mengatur tentang implementasi pengelolaan sampah, retribusi, kompensasi, peran masyarakat, pengawasan dan pembinaan, pelaporan, serta pembiayaan pengelolaan sampah.
4. SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Standar ini membahas tentang persyaratan teknis pengelolaan sampah kota serta teknik operasional pengelolaan sampah.
5. SNI 3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di Pemukiman. Standar ini mengatur tentang pengelolaan sampah di pemukiman dengan perubahan sebagian pada penerapan 3R mulai dari sumber sampah sampai TPS.

2.4.5 Aspek Peranserta Masyarakat

Kata peranserta memiliki arti yang sama dengan partisipasi. (KBBI Online, 2016). Sebagian pakar mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka

untuk ikut serta menyumbangkan kemampuan dalam mencapai tujuan kelompok tersebut. Sedangkan Mubyarto (1988) dalam Suparjan, et.al (2016) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Oakley dan Marsden (1987) dalam Mathbor (2016) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai proses dimana individu, keluarga, atau masyarakat bertanggung jawab untuk kesejahteraan mereka sendiri dan mengembangkan kapasitas untuk memberikan kontribusi pada pengembangan diri mereka sendiri dan masyarakat.

Adisasmita (2016) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk turut berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan.

Menurut Diana Conyers (1954) dalam Suparjan et.al (2016), ada 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya.

3. Adanya pandangan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan oleh Suparjan et.al (2016), partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan mutlak diperlukan karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Adanya pelibatan masyarakat memungkinkan mereka mempunyai rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap keberlanjutan suatu program kegiatan. Dengan pendekatan partisipatif, diharapkan partisipasi, potensi dan kreativitas masyarakat dapat lebih tergali.

Cohen dan Uphoff (2016) membagi partisipasi dalam empat jenis partisipasi yaitu:

1. *Participation in decision making* atau partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. *Participation in implementation* atau partisipasi dalam pelaksanaan.

Meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

3. *Participation in benefits* atau partisipasi dalam pengambilan manfaat.

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

4. *Participation in evaluation* atau partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Arnstein (1969) mengemukakan sebuah teori *The Ladder of Citizen Participation* (Tangga Partisipasi Publik) atau yang populer dengan *The Arnstein's Ladder* (Tangga Arnstein) yang terdiri atas delapan anak tangga dan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian kesatu, Nonparticipation (Tidak ada partisipasi) yang berjenjang dari Manipulation dan Therapy. Pada bagian ini, otoritas yang berkuasa sengaja menghapus segala bentuk partisipasi publik. Bagian kedua, *Tokenism* (Delusif) yang memiliki rentang dari *Informing*, *Consultation* dan *Placation*. Dalam *Tokenism*, otoritas yang berkuasa menciptakan citra, tidak lagi menghalangi partisipasi publik. Kenyataannya berbeda. Benar partisipasi publik dibiarkan, namun mereka mengabaikannya. Mereka tetap mengeksekusi rencananya semula. Bagian ketiga adalah *Citizen Power* (Publik Berdaya) yang terdiri atas *Partnership*, *Delegated Power* dan *Citizen Control*. Saat partisipasi publik telah mencapai *Citizen Power*, maka otoritas yang berkuasa benar-benar mendahulukan peran serta publik dalam berbagai hal.

2.5 Pengelolaan Sampah dengan 3R

Tata cara pengelolaan sampah di permukiman diatur dalam revisi SNI 03-3242-1994 dengan diterapkannya 3R mulai dari kegiatan di sumber sampah sampai dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS). Penerapan 3R (reduce, reuse dan recycle) di sumber sampah dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk ikut serta mengelola sampah mulai dari pemilahan sampah organik dan anorganik serta mengolah sampah organik dengan menggunakan komposter rumah tangga. Sedangkan di TPS dilakukan dengan melibatkan pengelola yang berasal dari masyarakat setempat untuk melakukan pendaur ulangan sampah anorganik dan pengomposan skala lingkungan (Dirjen Cipta Karya, 2017).

Penanganan sampah 3R adalah konsep penanganan sampah dengan cara *reduce* / mengurangi (R1), *reuse*/menggunakan kembali (R2), dan *recycle*/mendaur ulang sampah (R3) mulai dari sumbernya. Penanganan sampah 3R sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sampah padat perkotaan yang efisien dan efektif sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya pengelolaan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan perhitungan di atas kertas, bila sampah kota dapat ditangani melalui konsep 3R, maka sampah yang sampai yang akan sampai di TPA hanya \square 20% saja. Hal itu berarti akan sangat mengurangi biaya pengangkutan dan pembuangan akhir. Penanganan sampah 3-R akan lebih baik lagi bila dipadukan dengan siklus produksi dari suatu barang yang akan dikonsumsi (Dirjen Cipta Karya, 2017).

Langkah-langkah pengerjaan penanganan sampah 3R dapat disesuaikan dengan sumber penghasil sampah, seperti daerah perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan daerah komersial.

2.6 Standar Operasional Prosedur Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat

1. Armada Persampahan

Setiap hari mengangkut sampah sesuai jalur dan jadwal yang telah ditentukan yaitu pagi, siang, malam dan subuh tergantung jadwal masing-masing.

Jadwal malam khusus untuk dipasar, karena sesuai kondisi dan kenyamanannya agar tidak mengganggu keadaan yang ada dipasar. Ada dua tipe armada persampahan yaitu armada tipe amroll dan tipe *damtruck*. Sedangkan untuk jadwal sampah rumah tangga jam 08.00.

Mobil *damtruck* setiap hari harus dibersihkan setelah pulang kerja dan melaporkan setiap kali bagaimana kondisi mobil serta sopir harus tanggung jawab penuh terhadap armada.

2. Penyapu Jalan

2 kali sehari pagi dan sore pekerja membersihkan jalan-jalan dimulai dengan jam 6 pagi sampai dengan selesai dan sore setelah ashar sampai jam 6 sore.

Di pagi hari pekerja membersihkan sampah tanah misalnya merapikan taman pembatas jalan kemudian mencabut rumput sedangkan di sore hari pekerja mengangkat sampah sisa tadi pagi dengan membawa peralatan kerja sendiri / masing-masing. Jumlah pekerja sebanyak 46 orang dan telah ditetapkan sesuai lokasi masing-masing. Setiap dibutuhkan pekerja diwajibkan untuk hadir dan adapun juga dibutuhkan diluar jadwal.

3. Pembersih denase/lior

Membersihkan parit-parit diwilayah kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Penyelesaian sesuai target tempat yang harus dikerjakan mulai dari parit-parit dan badan parit.

4. TPA

a. Menjaga komplek TPA

b. Mendistribusikan dan mengarahkan armada persampahan dalam memposisikan sampah yang dibuang dalam tempat sampah/sel.

c. Meoperasionalkan alat berat dalam rangka mempertahankan sampah dalam TPA dengan setiap hari mengangkat sampah sebanyak 24 damtruck setiap harinya.

5. Worshop (Gudang)

Menjaga dan mengatur penyimpanan armada persampahan dan merawat armada jika ada yang kerusakan dengan penjaga gudang sebanyak 4 orang ditambah 3 orang lagi mempunyai profesi masing-masing yaitu bagian ganti ban, las dan mesin.

Jumlah Mobil :

1. Damtruck = 12

2. Pick-Up = 4

3. Amroll = 5

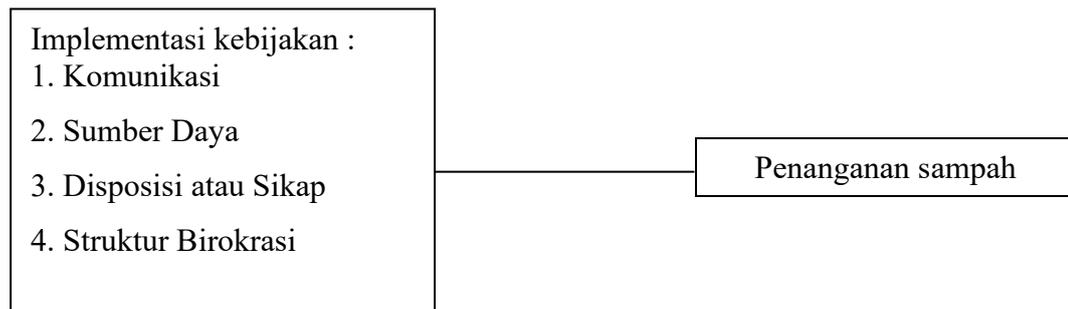
4. Tangki Tinja = 3

5. Tangki Siram = 2

6. Becak = 4.

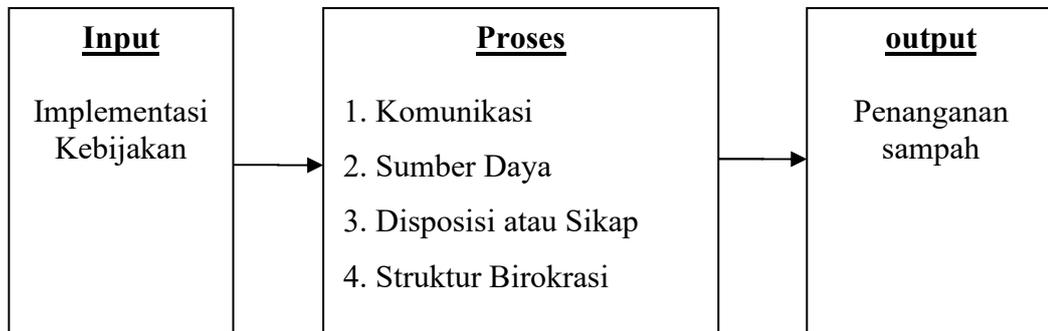
2.7 Kerangka Pikir

Kerangka teori ini disimpulkan berdasarkan teori menurut (George C. Edward III dalam Wahab (2016) sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Teori

2.8 Alur Pikir



Gambar 2.2 Alur Pikir

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Persampahan Organik Dan Anorganik Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat dilihat melalui komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi sehingga dapat penanganan sampah bisa dilaksanakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Persampahan Organik Dan Anorganik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat”.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 16 Juli – 02 Agustus tahun 2021.

3.3 Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi (Arikunto, 2016). Informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Informan Utama adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup 1 orang.
- b. Informan Kunci adalah Kabid pelayanan 1 orang
- c. Informan Pendukung (IP1) staf Dinas Lingkungan Hidup 1 orang
- d. Informan Pendukung (IP2) Pelaksana pekerja lapangan Dinas Lingkungan Hidup 1 orang dan 1 orang masyarakat

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian secara khusus. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara.

a. Pengamatan (Observasi).

Metode ini dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengamati sambil terus melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap segala bentuk informasi yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Persampahan Organik Dan Anorganik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.

b. Wawancara mendalam (*Indept Interview*)

Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkompeten atau berwenang serta yang dianggap lebih mengetahui dan memahami masalah penelitian untuk member informasi dan keterangan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Persampahan Organik Dan Anorganik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat dan data perpustakaan yang mendukung penelitian.

3.5 Definisi Istilah

Tabel 3.1 Definisi Istilah

Variabel	Defenisi	Informan Utama & Kunci	Informan Pendukung	Metode	Dari
Komunikasi	hubungan atau interaksi antara petugas pelaksana penanganan sampah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup 1 orang dan Kabid pelayanan 1 orang	Staf Dinas Lingkungan Hidup 1 orang dan Pelaksana lapangan Dinas Lingkungan Hidup 1 orang, 1 orang masyarakat	Indept Interview	Pedoman Wawancara
Sumber daya	seluruh sarana dan prsarana meliputi jumlah staf, keahlian dalam pelaksanaan penanganan sampah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup 1 orang dan Kabid pelayanan 1 orang	Staf Dinas Lingkungan Hidup 1 orang dan Pelaksana lapangan Dinas Lingkungan Hidup 1 orang, 1 orang masyarakat	Indept Interview	Pedoman Wawancara dan Observasi
Disposisi atau Sikap	tanggapan atau respon petugas dalam pelaksanaan penanganan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup 1 orang	Staf Dinas Lingkungan Hidup 1 orang dan Pelaksana	Indept Interview	Pedoman Wawancara

	sampah	dan Kabid pelayana n 1 orang	pekerja lapangan Dinas Lingkungan Hidup 1 orang, 1 orang masyarakat		
Struktur Birokrasi	karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif antar petugas pelaksanaan penanganan sampah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup 1 orang dan Kabid pelayana n 1 orang	Staf Dinas Lingkungan Hidup 1 orang dan Pelaksana pekerja lapangan Dinas Lingkungan Hidup 1 orang, 1 orang masyarakat	Indept Interview	Pedoman Wawancara dan Dokumentasi

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu pengumpulan dan pengolahan data tentang variabel yang di teliti secara garis besar, instrumen terbagi 2 yaitu instrumen tes dan instrumen nontes. Instrumen tes dapat berupa tes objektif dan tes uraian, sedangkan tes yang tergolong notes diantaranya dapat berupa wawancara, observasi atau studi dokumentasi yaitu berupa rekaman wawancara (Sugiono, 2017)

Dalam penelitian tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat yang menjadi instrumen penelitian adalah wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan kamera, alat perekam, dan alat tulis.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Data *Reduction* (Reduksi data)

Reduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberi gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

3.6.2 Data *Display* (Penyajian data)

Dengan menyajikan data maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3.6.3 *Conclusion Drawing / Verification* (Penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiono, 2017).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Aceh Barat terbentuk diakhir tahun 2013, dimana sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupaten Aceh barat adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat. terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Aceh Barat didukung oleh kebutuhan untuk peningkatan pengelolaan Lingkungan Hidup yang berada dalam Kabupaten Aceh Barat.

Dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat adalah Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat merupakan unsur pendukung Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Tata Lingkungan;
4. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
5. Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
6. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional. (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, 2020)

Informan yang ditentukan oleh peneliti merupakan orang-orang yang menurut peneliti mampu mewakili dalam pemberian informasi lengkap yang dibutuhkan oleh peneliti.

Tabel 4.1 Informan Penelitian

No	Kode Informan	Pekerjaan
1.	IU	kepala dinas DLH 1 orang
2.	IK	Kabid pelayanan 1 orang
3.	IP1	staf DLH 1 orang
4.	IP2	Pelaksana pekerja lapangan DLH 1 orang
5	IP3	Masyarakat 1 Orang
Total		5 orang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Barat, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Persampahan Organik Dan Anorganik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1. Informan Utama

1. Komunikasi

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai komunikasi seperti dalam cuplikan wawancara Informan Utama (IU) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah komunikasi dalam kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan non organik di dinas lingkungan hidup ?

IU : *Jadi begini masalah sampahkan sudah diatur sedemikian rupa penanganan dan pengolahan persampahan itu sudah di atur yang namanya pengolahan persampahan itu adalah pengolahan persampahan di kawasan perkotaan dan kecamatan jadi dia ada UU no 18 tahun 2018 tentang pengolahan persampahan, kemudian ada juga yang namanya permenagri no 33 tahun 2010 tentang teknik pengolahan sampah. Menyangkut kebijakan pemerintah di Kabupaten Aceh Barat terkait dengan pengolahan pada tahun 2017 kita sudah menghasilkan sebuah aturan atau regulasi terkait dengan pengolahan persampahan di kabupaten yang di tuangkan dalam qanun no 4 tahun 2017 tentang pengolahan sampah di situ sudah di atur sedemikian rupa dan juga berbagai kebijakan termasuk sanksi-sanksi bagi orang orang yang melanggar dalam hal pengolahan sampah. Kemudian di mulai dari sisi perencanaannya dan sampai dengan apa siapa-siapa saja yang terlibat. Jadi keterlibatan pengolahan persampahan ini di Kabupaten Aceh Barat baik itu secara perorangan maupun berkelompok swadaya masyarakat, perusahaan, pemerintah itu akan di libatkan semuanya jadi semua elemen masyarakat ini terlibat bagi cara perorangan maupun berkelompok semua orang bertanggung jawab terkait dengan penanganan persampahan walau pun dari satu sisi untuk pengolahan persampahan pertama itu kan oleh pemerintah kabupaten jadi kita saat ini di Kabupaten Aceh Barat ini ada 5 tempat pertama yang kita tangani di kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo,*

Samatiga, Kaway XVI dan ada juga di Woyla. kalau di Woyla itu penanganan sampah pasar, jadi ada kebijakan yang sudah di atur sedemikian rupa di dalam itu Qanun no 4 tahun 2017 untuk pengolahan sampah organik dan anorganik itu ada programnya kemudian sampah anorganik itu sekitar 50 sampai 70 % sampah yang di bawah ke TPA itu sampah anorganik semua sampah yang penguraiannya oleh media alam itu sangat susah hancurnya, plastik itu kan butuh waktu 100 tahun atau lebih baru hancur plastik itu bahan kimianya sangat tinggi jadi sangat susah terurainya sedangkan sampah organik ini sampah yg bisa teruraikan seperti sampah makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, limbah rumah tangga dan sebagainya lah. itu lah sampah yang kita hasilkan dari perilaku kita kegiatan kita sehari-hari.

2. Kendala apa saja yang terjadi dalam komunikasi tentang penanganan persampahan organik dan anorganik di dinas lingkungan hidup ?

IU : Kendalahnya itu ada 2, ada kendala internal dan ada juga kendala dari sisi eksternal. Kendala internal itu kendala sarana dan prasarana kita yang masih terbatas dan yang namanya pengolahan sampah ini akan terus ada selama masih ada aktifitas kegiatan manusia di muka bumi ini seperti kegiatan-kegiatan industri dan kegiatan segala macamnya itu sampah dan juga limbah yang kita hasilkan juga bisa di katakan sampah sebenarnya. Kendala internal yang saya katakan ini sarana pendukung sarana perkotaan Aceh Barat masih belum maksimal masih terbatas kemudian sarana-sarana yang usianya sudah cukup lama termasuk juga alat berat yang butuh penanganannya di TPA. Kemudian eksternalnya begini kami melihat masih ada masyarakat tingkat kesadarannya itu kurang terkadang kita sudah menempatkan tempat sampah atau kontainer atau segala macam tempat sampah tapi masih ada masyarakat berat memasukkan sampah pada tempatnya malah main lempar sembarangan di luar tempat sampah yang di sediakan, tingkat kepedulian masyarakat itu kurang ya.

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Utama (IU)

bahwa komunikasi tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan

organik dan non organik di atur dalam Undang-undang dengan aturan dan regulasi terkait dengan pengolahan persampahan sesuai dengan perencanaanya dan keterlibatan perorangan maupun kelompok swadaya masyarakat, perusahaan, pemerintah itu akan dilibatkan semuanya elemen masyarakat, kemudian kebijakan sudah diatur didalam Qanun, Menyangkut kebijakan pemerintah di Kabupaten Aceh Barat terkait dengan pengolahan pada tahun 2017 menghasilkan sebuah aturan atau regulasi terkait dengan pengolahan persampahan di kabupaten yang di tuangkan dalam qanun no 4 tahun 2017 tentang pengolahan sampah untuk pengolahan sampah organik dan anorganik itu ada programnya kemudian sampah anorganik itu sekitar 50 sampai 70 % sampah yang di bawah ke TPA, 5 tempat pertama yang yang ditangani yaitu kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo, Samatiga, Kaway XVI dan ada juga di Woyla Kendala itu ada 2, ada kendala internal yaitu kendala sarana dan prasarana yang terbatas ,tenaga masih terbatas dan yang namanya pengolahan sampah ini akan terus ada selama masih ada aktifitas kegiatan manusia dan ada juga kendala dari sisi ekstsernal yatu dukungan sarana perkotaan Aceh Barat masih belum maksimal masih terbatas kemudian sarana-sarana yang usia nya sudah cukup tua termasuk juga alat berat yang penanganannya di TPA.

2. Sumberdaya

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai sumberdaya seperti dalam cuplikan wawancara Informan Utama (IU) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan persampahan organik dan anorganik?

IU : *Sekarang ini kita mempunyai sarana armada trek sampah aja sekitar 21 unit pendukung kemudian ada tempat sampah kalau di hitung-hitung semua hampir seribuh ya karna jumlahnya agak susah juga saya hitung ini jangankan di tempat lain di tempat saya aja hilang 2 buah tong sampah ini. kalau kontainer itu ada 22 buah kontainer ini penempatannya ada di jalan singamata dua, di suak indrapuri, kemudian di pasar itu di luar dalam kami letakkan kemudian di kawasan kantor bupati kemudian di pesantren darul Itami Ujung Tanjung kemudian ada juga wessbank namanya tempat sampah kemudian ada tempat sampah beton mungkin sudah tidak nampak lagi tpi kalau masuk pasar bina usaha mungkin ada cuma rata-rata sudah rusak.jadi rencana pada tahun ini akan kami buat kembali tempat sampah yang sisinya beton itu biar gk di angkat-angkat ya,kemudian ada tempat sampah yang model tutup itu tempat sampah plastik atau tempat sampah basa dan juga sampah yang bahannya berbahaya.*

2. Adakah staf yang kurang berperan dalam kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik?

IU : *Rata-rata itu kan di lapangan penangan sampah semua rata-rata mereka berkerja jadikan penangan persampahan ini hampir 190 orang yang bekerja penanganan persampahan ada pertamanan termasuk pengiraman itu. Sebenarnya penyiraman itu sudah termasuk ketaman bukan sampah jadi saya agak susah juga menterjemahkan ini yang di katakan kurang berperan itu disisi bagaimana sementara dia kan berkerja mungkin tingkat kualitas kerja orang nya aja berbeda-beda misalnya dari 3 orang pekerja kita suruh sapu jalan yang satu sangat*

bersih, yang satunya lagi agak-agak bersih atau sedang dan yang satunya lagi kurang bersih. Mungkin di situ lah contohnya tapi rata-rata orang itu berkerja cuma itu lah kualitas kerjanya aja yang berbedah-bedah dan bagi saya sanksinya keras kalau yang tidak berkerja itu akan kena peringatan satu atau dua kalau satu atau dua juga tidak didengarkan maka saya akan katakkan untuk mencari kerja yang lain yang sesuai dengan hatinya.

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Utama (IU) bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yaitu 21 armada trek sampah, tempat sampah yang hampir mencapai seribu, 22 buah kontainer, dipasar berupa beton agar tidak diangkat-angkat dan kemudian tempat sampah dari plastik, diletakkan di pasar itu di luar dan dalam, di kawasan kantor bupati, kemudian di pesantren darul Itami Ujung Tanjung, kemudian ada juga wessbank. Kemudian peran staf semua bekerja hanya saja kualitas kerjanya aja yang berbedah-beda dan diberi sanksi keras kalau tidak bekerja dikenakan peringatan satu atau dua kali, apabila tidak didengar maka diberhentikan itu biasanya kepada penyapu jalan.

3. Disposisi/sikap

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai sumberdaya seperti dalam cuplikan wawancara Informan Utama (IU) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan yang sudah ditetapkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh staf?

IU : *Sebagian besar sudah yang sekarang yang kita susun terkait dengan kebijakan pengolahan persampahan adalah turunan terkait dengan turunan kanun no 4 tahun 2017 itu menyangkut perizinan pengolahan kegiatan pengolahan sampah, mungkin adek-adek ini taukan orang memilih sampah seperti pemulung itu mengumpulkkkan satu tempat di*

ikat-ikat di bawa naik trek di bawa lagi ke medan, jadi kedepan menyangkut perizinan dan akan di atur perizinannya itu yang harus di buat di tuangkan di peraturan bupati jadi ada qanun kalau kita di aceh ini tapi kalau di internasional perturan daerah nanti ada turunannya itu, itu lah yang sedang kita upayakan mencoba menyusun kemudian menyangkut kerja sama pengolahan persampahan itu juga harus di buat susunan kerja samanya begini contohnya ada sebuah kampung di Kota Meulaboh kita melakukan pengolahan persampahan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah Volume sampah. Selama ini sampah utuh dari rumah rumah langsung di angkat kemobil langsung ke TPA, tapi kerja sama pengolahan bagaimana sampah itu bisa di pilah sebagai contohnya adalah di kampung belakang itu ada pengolahan sampah 3 R yaitu reguis, renyus, dan resexter jadi bahan-bahan yang bisa di mamfaatkan di olah di situ mungkin kalau ada kesempatan di hari-hari lain jalan aja sebentar di lihat ada kampung belakang bagian pasir itu di simpang Capella lurus teros belok kiri sedikit ada taman kosong ada di situ TPS 3 R biaya hampir 500 juta ada pengolahan sampah plastik itu akan menjadi nilai ekonomis masyarakat jadi pengertiannya tidak menganggap lagi sampah tapi adalah sesuatu yang bisa di mamfaatkan apa lagi tahun ini kan nilai lingkungan hidup sedunia ini kan temanya kendalikkan sampah plastik.

2. Jika terjadi disposisi/sikap kesenjangan dan hambatan kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik, apa yang dilaksanakan?

IU : *Jika terjadi, kami langsung mengevaluasi kenapa itu bisa terjadi, Cuma selama ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur hanya saja mungkin dari yang membuang sampah kurang ikut bekerja sama.*

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Utama (IU) bahwa kebijakan yang sudah diterapkan sebagian besar yang disusun terkait dengan kebijakan pengolahan persampahan sesuai no 4 tahun 2017 itu menyangkut perizinan pengolahan kegiatan pengolahan sampah dan sesuai dengan peraturan bupati dan qanun, di Kota Meulaboh dilakukan pengolahan persampahan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah Volume sampah kemudian setiap kesenjangan dievaluasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

4. Struktur Birokrasi

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai struktur birokrasi seperti dalam cuplikan wawancara Informan Utama (IU) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Adakah kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik di dinas lingkungan hidup sudah dijalankan sesuai prosedur?

IU : *Iya sudahkan sudah saya sampaikan tadi kita sekarang ini sudah menerapkan program pengolahan sampah berbasis 3R yang di lestarikan masyarakat salah satu contohnya yang saya katakan tadi yang proyeknya kampung belakang itu salah satu peraturan pengolahan sampah organik dan anorganik tpi memang masih sangat terbatas ya. waktu saya kejakarta kemaren itu saya ketemu dengan pihak kementrian di IPLT (Intalansi pengolahan lumpur tinja) di jakarta ada suatu lokasi yang saat ini bikin kita sendiri agak merasa jijik lah ini*

lumpur tinja ya dek, lumpur tinja itu lama kelamaan dia bukan berbentuk tinja lagi tetapi dia akan menghitam ubahnya seperti tanah biasa kalau sekarang di manfaatkkan untuk jadi bahan bakar rumah tangga, bukan di bio gasnya saja semacam blok-blok petak gitu briket namanya yaitu tanah lumpur tinja itu dia kan mengandung gas ada unsur amonia di dalamnya, rasanya jijikan itu waktu saya di kementerian itu di sampaikan tinja itu kalau sudah kering sifatnya itu mudah sekali terbakar karna dia mengandung amonia kalau di dalam septik itu dia kan menghasilkan amonia sedangkan amonia kalau di sangkut pautkan termasuk biogas itu salah satu contohnya di situ ya kita sudah berupaya bersosialisasi dengan masyarakat tentang pengolahan sampah organik dan anorganik ini.

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Utama (IU) kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik sudah menerapkan program pengolahan sampah berbasis 3R yang di lestarikan masyarakat, Kemudian manfaatkkan untuk jadi bahan bakar rumah tangga, bukan di bio gasnya saja semacam blok-blok petak gitu briket namanya yaitu tanah lumpur tinja itu dia kan mengandung gas ada unsur amonia di dalamnya, berupaya bersosialisasi dengan masyarakat tentang pengolahan sampah organik dan anorganik ini.

4.2.2. Informan Kunci

1. Komunikasi

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai komunikasi seperti dalam cuplikan wawancara Informan Kunci (IK) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah komunikasi dalam kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan non organik di dinas lingkungan hidup ?

IK : *Kalau kita disini untuk penanganan pengelolaan masih proses pengambilan dari sumbernya kemudian kita bawa ke TPA nah itu jadi untuk pengelolaan seperti proses 3R, 5R itu belum kita lakukan, jadi masih sistemnya itu masih sistem pendamping*

2. Kendala apa saja yang terjadi dalam komunikasi tentang penanganan persampahan organik dan anorganik di dinas lingkungan hidup ?

IK : *Kendala nya, nah kendalanya itu yang pertama sekali partisipasi masyarakat nya itu masih kurang sehingga pada saat kita melakukan pengumpulan sampah disumber itu banyak masyarakat dia buang sampah nya tidak pada contoh misalnya tidak pada TPS tidak dalam TPS tidak didalam kontainer tidak ditempat tong sampah yang kita letakkan kita sediakan. Jadi pada umumnya contoh misalnya di daerah Jalan Singgah mata dua itu kita letakkan dua kontainer tetapi masyarakat tidak membuang sampahnya tidak didalam container, model lempar sambil lewat, kemudian contoh misalnya di Jalan Terendam itu gitu juga, itu kita memang belum membangun TPS disitu tapi mereka buang sampah sembarangan, pada saat kita cek ini memang bukan orang kampung atau bukan orang desa disitu tapi*

orang diluar daerah yang buang sampah kesitu, jadi kendala utama itu kita dari masyarakatnya sendiri tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah itu belum ada di tempat khusus sedangkan kita tempat-tempat sampah sudah kita lakukan

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Kunci (IK) bahwa komunikasi tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan untuk penanganan pengelolaan masih proses pengambilan dari sumbernya kemudian kita bawa ke TPA pengelolaan seperti proses 3R dan belum dilakukan 5R. Kendala yang terjadi partisipasi masyarakat yang masih kurang dimana tempat disediakan tapi bukan kedalam tempat pembuangan sampah dalam membuang sampah, dan kesadaran masyarakat belum mengkhhususkan tempatnya.

2. Sumberdaya

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai sumberdaya seperti dalam cuplikan wawancara Informan Kunci (IK) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan persampahan organik dan anorganik?

IK : *Kalau sarana dan prasarana kita punya armada, nah ini kita punya armada yang jalan itu sekarang kalau truk sampah itu ada 25 unit dari 28 unit jadi 2 rusak, kemudian kita juga punya ambrol, mobil ambrol itu untuk mengangkut menarik kontainer, kita punya 6 unit kontainer di titik-titik ada didalam Kabupaten Aceh Barat kemudian wilayah kerja kita itu ada di 5 kecamatan, jadi Johan Pahlawan, Meureubo, Kaway XVI, Samatiga kemudian Woyla Induk Kuala Abe. Nah jadi kita dari 5*

kecamatan ini yang kita tangani itu untuk sampai tahun 2017 itu kinerja kita itu sudah di 78%

2. Bagaimana peran yang dijalankan petugas, Adakah staf yang kurang berperan dalam kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik?

IK : *Oh itu pasti ada, karena yang namanya kinerja manusia itu kan hari ini dan kemaren atau hari ini dan besok pasti ada mood-mood tan dia ada senang ada tidak, misalnya hari kalau dia memang lagi senang kerjanya lancar cepat, ternyata besok mungkin kurang pas satu dan lain hal mungkin permasalahan keluarga jadinya dia ya lambat, tapi kita tekan kan untuk jalur kerja itu harus bersih, nah sedangkan sarana dan prasarana yang kita berikan ke mereka itu sudah ada mulai safety mulai baju kita berikan, baju kemudian sarung tangan kita berikan kemudian sepatu karet sepatu ape kita berikan pokoknyan untuk safety pribadi kita berikan kecuali helm itu nggak ada*

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Kunci (IK) bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu armada 25 unit dan 2 rusak, mobil ambrol untuk mengangkut mobil kontainer yaitu sebanyak 6 kontainer yang ada sarana dan prasarana dan kinerja sudah 78%. kemudian sarana ada ambrol, mobil ambrol itu untuk mengangkut menarik kontainer, 6 unit kontainer di titik-titik ada didalam Kabupaten Aceh Barat kemudian wilayah kerja ada di 5 kecamatan, jadi Johan Pahlawan, Meureubo, Kaway XVI, Samatiga kemudian Woyla Induk Kuala Abe. Kemudian apabila ada petugas yang kurang berperan dipastikan ada mungkin penyebabnya adalah permasalahan dari luar yang menyebabkan pekerjaan kurang cepat.

3. Disposisi/sikap

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai sumberdaya seperti dalam cuplikan wawancara Informan Kunci (IK)) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan yang sudah ditetapkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh staf?

IK : *Oh ya sudah, jadi ya memang tingkat kepatuhan pekerja itu sangat bagus di Dinas Lingkungan Hidup ini jadi tidak ada yang bisa kita bilang oh tidak mau, malas itu tidak ada itu rajin semua*

2. Jika terjadi disposisi/sikap kesenjangan dan hambatan kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik, apa yang dilaksanakan?

IK : *Jadi gini, kebijakan yang kami lakukan disini atas nama Dinas Lingkungan Hidup itu akan berdampak terhadap penimbunan sampah dalam Kabupaten Aceh Barat jadi kalau kebijakan kami mengambil kebijakan yang salah maka sampah akan banyak dampaknya ke masyarakat ya sudah pasti ke kesehatan, karena kebersihan kota Aceh Barat tidak tercapai, karena gol tujuan dari Dinas ini adalah untuk tercapainya tingkat kebersihan kenyamanan keamanan, sehingga tercapailah yang namanya Adipura itu. nah jadi target kita disini adalah Adipura. Adipura itu suatu piagam suatu penghargaan yang diberikan dari Kementerian hidup dan kehutanan dan itu diperlombakan setiap tahun , kalau kita sudah peroleh tahun 2014 kita sudah dapat piagamnya untuk tahun ini targetnya itu juga.*

Bukan dia itu seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia nanti ada kategori, Adipura ini dia itu ada kategori dia banyak jenjang nya.

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Kunci (IK) bahwa kebijakan yang sudah ditetapkan tingkat kepatuhannya sangat bagus, kemudian mengenai kesenjangan dan hambatan biasanya berdampak terhadap penimbunan sampah, apabila tidak terkoordinir akan berdampak pada kesehatan masyarakat karena gol tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu tercapainya tingkat kebersihan, kenyamanan dan keamanan yaitu target Adipura.

4. Struktur Birokrasi

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai struktur birokrasi seperti dalam cuplikan wawancara Informan Kunci (IK) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Adakah kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik didinas lingkungan hidup sudah dijalankan sesuai prosedur?

IK : *Oh ya sudah, nah kalau dari struktur organisasi kita ada Kepala dinas dibawahnya ada Sekretaris kemudian kita ini ada 3 bidang, 2 bidang 1 sekretaris. Jadi satu bidang, bidang saya ini sekarang kebersihan dan konservasi lingkungan kemudian ada satu lagi bidang PTL itu Penataan Dan Tata Lingkungan kalau nggak salah saya dan satu lagi ada sekretaris, jadi itu sudah diterapkan*

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Kunci (IK) bahwa prosedur yang dilaksanakan sesuai struktur organisasi yang dibentuk sebelumnya.

4.2.3. Informan Pendukung

1. Komunikasi

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai komunikasi seperti dalam cuplikan wawancara Informan Kunci (IP1) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Dalam penanganan persampahan organik dan non organik di dinas lingkungan hidup, bagaimana komunikasi dalam penerapan kebijakan yang diterapkan?

IP1: *Yang diterapkan ini, itulah tiap hari kami jadi bagi jalur misalnya satu mobil, misanya di jalan ini di jalan itu, contohnya jalan Nasional sudah ada 2 mobil yang dari Meurebo sampai kesana Ujung Karang*

2. Kendala apa saja yang terjadi dalam komunikasi tentang penanganan persampahan organik dan anorganik di dinas lingkungan hidup ?

IP1 : *Ini kendalanya kadang-kadang nanti kesadaran masyarakat buang sampah tadi, tadi di buang dalam tempat sampah dibuang diluar tempat sampah, itu yang banyak jadi masalah.*

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Kunci (IP1) bahwa komunikasi tentang kebijakan yang diterapkan seperti sesuai dengan pelaksanaannya misalnya penetapan langkah kerja setiap harinya. Kendala yang terjadi kesadaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

2. Sumberdaya

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai sumberdaya seperti dalam cuplikan wawancara Informan Kunci (IP1) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana apa saja yang dibutuhkan, bagaimana pengadaan sarana dan prasarana tersebut?

IP1 : *Ya mobilisasi mobil ini truk istilah nya kan, setelah itu tempat sampah sarana prasarana kan, kemudian seperti disana di TPA nanti beko*

2. Peran apa yang anda laksanakan dalam penanganan persampahan organik dan anorganik?

IP1 : *Peran kami nanti bagaimana istilahnya, nanti ambil bersihkan, peran membersihkan, kemudian mengontrol ditempat-tempat yang belum diambil nanti kami kembali nanti untuk ambil, pokoknya kami tiap hari pelayanan kadang nanti ada yang tinggal di hubungi sama yang punya rumah, atau nanti terpaksa kami ambil dengan mobil piket nanti begitu*

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Kunci (IP1) bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan berupa mobil truk dilapangan seperti beko. Peran yang dilaksanakan peran membersihkan dan mengontrol, kemudian pelayanan yang terkadang dihubungi oleh orang rumah langsung.

3. Disposisi/sikap

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai sumberdaya seperti dalam cuplikan wawancara Informan Kunci (IP1) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap anda terhadap pelaksanaan penanganan sampah?

IP1 : *Sikap memang sudah kewajiban bagaimana kita bilang, walau pun marah-marah-marah kita tahan juga, contohnya misal seperti datang kemari Jalan Singgah Mata Dua kan kita letakkan kontainer disana, jadi itulah mereka yang membuang bukan membuang kedalam kontainer dibuang keluar itu ya terpaksa kami nanti kadang-kadang*

ada kami panggil untuk meletakkan dalam kontainer apabila kami terlihat mereka seperti itu

2. Jika terjadi disposisi/sikap kesenjangan dan hambatan, upaya yang dilaksanakan?

IP1 : *ini kalau kita bilang kesenjangan memang bagaimana ya memang tidak ada kesenjangan, kesenjangan kan sama orang yang membuang sampah, sebagian ada yang mengambil sebagian ada yang tidak mengambil kan, jadi itu tergantung, kan ada PHD, tiap orang ada bayar PHD kami tetap layani seperti itu kalau tidak ada yang terpaksa kami tinggal, kalau kami ambil berarti orang yang bayar PHD tidak mau dibayar lagi, kenapa dia tidak bayar tetapi diambil*

Jadi disana mungkin tidak terlalu iya kan, misalnya kalau dikota disani mereka itu yang misalnya tidak mau bayar, kalau kita ambil yang tidak bayar nanti marah jadi terpaksa kita tinggal, tapi nanti hari-hari kita ambil juga

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Kunci (IP1) bahwa sikap terhadap pelaksanaan penanganan sampah dikarenakan sudah kewajiban jadi jika terjadi tidak sesuai permasalahan masyarakatnya sering mereka menegur, kemudian kesenjangan kan sama orang yang membuang sampah masyarakat yang tidak membayar PHD maka sampahnya tidak akan diangkut.

4. Struktur Birokrasi

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai struktur birokrasi seperti dalam cuplikan wawancara Informan Kunci (IP) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Adakah setiap pelaksanaan sudah dijalankan sesuai prosedur yang seharusnya, dan bagaimana prosesnya?

IP1 : *hai proses prosedur setiap ada sampah harus kita lakukan sesuai dengan Qanun dan segala macam*

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Kunci (IP1) bahwa dilakukan sesuai dengan qanun dan prsedur yang berlaku

1. Komunikasi

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai komunikasi seperti dalam cuplikan wawancara Informan Kunci (IP2) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana komunikasi kebijakan pelaksanaan penanganan persampahan yang diterapkan pemerintah, adakah terlaksana?

IP2: *Penanganannya kita bawa ke TPA nah itu jadi untuk pengelolaan seperti proses 3R, 5R itu belum kita lakukan, jadi masih sistemnya itu masih sistem pendamping*

2. Kendala apa saja yang terjadi dalam komunikasi tentang penanganan persampahan dilapangan?

IP2 : *Kendala nya, nah kendalanya itu yang pertama sekali partisipasi masyarakat nya itu masih kurang sehingga pada saat kita melakukan pengumpulan sampah disumber itu banyak masyarakat dia buang sampah nya tidak pada contoh misalnya tidak pada TPS.*

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Kunci (IP2) bahwa komunikasi tentang kebijakan pelaksanaan penanganan persampahan dibawa ke TPA dan dilakukan pengelolaan 3R dan belum menggunakan 5R, kendala yang terjadi partisipasi masyarakat yang kurang yang belum menggunakan sarana dan prasarana dengan sesuai.

2. Sumberdaya

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai sumberdaya seperti dalam cuplikan wawancara Informan Kunci (IP2) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan persampahan organik dan anorganik dilapangan?

IP2 : *TPA, kontainer dan beko untuk lapangan*

2. Bagaimana pekerjaan dilapangan yang dilaksanakan?

IP2 : *Kalau pekerja dilapangan kita rutin, memang kerja kita rutin tiap hari tanpa libur cuma dipihak armada ini memang ada rute masing-masing dia, memang sudah ada jalur khusus pihak orang itu cuma jalur yang sudah kita bagi itu aja yang dia jaga gitu*

3. Berapa orang yang ikut berperan dan aktif dilapangan terhadap penanganan persampahan?

IP2 : *Kalau orang kita armada aja kita ada 25 unit, orangnya keunek sama supir, keunek aja sekitar 44 orang tambah supir 25 orang, itu lah ada macam di TPA sana kan, di TPA kita ada petugas juga alat berat itu macam yang membersihkan TPA tu cuma kalau saya ini aja apa cuma armada aja gitu*

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Kunci (IP) bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan TPA, kontainer dan beko untuk lapangan kemudian pekerjaan dilapangan rutin dilaksanakan karena setiap hari ada armada masing-masing yang rute perjalanannya sudah dibagi, yang ikut berperan aktif sekitar 25 unit dan orang kerja sekitar 44 orang ditambah 25 supir di TPA.

3. Disposisi/sikap

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai sumberdaya seperti dalam cuplikan wawancara Informan Kunci (IP2) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap anda terhadap pelaksanaan penanganan sampah?

IP2 : *Kalau sikap kita untuk sampah kita layani masyarakat, memang kita untuk melayani masyarakat cuma pihak armada saya yang awasi kan, nanti masyarakat ada yang apa lapor sama saya dulu nanti saya sampai kan sama kasi pak KASI langsung pak KABID itu*

2. Jika terjadi disposisi/sikap kesenjangan dan hambatan dalam menangani persampahan, upaya yang dilaksanakan?

IP2 : *Kalau kendala kita memang banyak, kendalanya nanti ada dari pihak masyarakat nanti gitu nggak bayar retribusi cuma itu. Tapi kalau kendala lapangan yang untuk sementara ini nggak ada, kalau untuk bagian armada kan kita fasilitas ada kasih untuk orang itu macam sepatu, sekop orang untuk jalan setiap hari dia.*

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Kunci (IK) bahwa sikap staf terhadap pelaksanaan melayani masyarakat melalui laporan lalu staf menyampaikan kepada KABID atau KASIE, kesenjangan dan hambatan banyak terjadi dari segi masyarakat seperti saat membayar retribusi dan bagian lapangan sudah lengkap seperti bagian alat yang menunjang pekerjaan.

4. Struktur Birokrasi

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai struktur birokrasi seperti dalam cuplikan wawancara Informan Kunci (IP2) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Adakah setiap pelaksanaan sudah dijalankan sesuai prosedur yang seharusnya, dan bagaimana prosesnya?

IP2 : setiap pelaksanaan penanganan persampahan sudah dijalankan sesuai prosedur yang seharusnya oleh petugas.

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Kunci (IP2) bahwa setiap pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

1. Komunikasi

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai komunikasi seperti dalam cuplikan wawancara Informan Kunci (IP3) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana komunikasi dalam kebijakan pelaksanaan penanganan persampahan yang diterapkan pemerintah, adakah terlaksana?

IP3: *Komunikasi petugas dilapangan biasa saja, mereka bertugas selayaknya petugas di pagi hari. Kita jarang berjumpa dengan pihak petugas karena jika yang mengangkut sampah ya tinggal angkut saja. Kebijakan kan mereka yang buat jadi kita ikut saja, misal saat pengangkutan adanya membayar iuran, Penyediaan tempat sampah tetapi buang sampah sembarangan tetap ada. Tidak ada kita ya mereka. Untuk kendala paling masyarakat masih belum terbiasa bedakan sampah organik n anorganik, lagian pihak petugas nanti di campur juga, kan tidak semua kami harus lakukan itu kan petugas*

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Kunci (IP3) bahwa kebijakan pelaksanaan dilakukan petugas dan hanya membayar iuran.

2. Sumberdaya

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai sumberdaya seperti dalam cuplikan wawancara Informan Kunci (IP3) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam penanganan persampahan organik dan anorganik dilapangan?

IP2 : *TPS, Tempat sampah anorganik dan organic, dan edukasi*

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Kunci (IP) bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan TPS, tempat sampah dan edukasi untuk masyarakat.

3. Disposisi/sikap

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai sumberdaya seperti dalam cuplikan wawancara Informan Kunci (IP3) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap petugas terhadap pelaksanaan penanganan sampah?

IP2 : *Kalau petugas sampah diambil cuma kadang saling kerja sama masyarakat dengan petugas saja kurang*

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Pendukung (IP3) bahwa sikap masih ada kurangnya kerja sama.

4. Struktur Birokrasi

Hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai struktur birokrasi seperti dalam cuplikan wawancara Informan Kunci (IP3) berdasarkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Adakah setiap pelaksanaan penanganan persampahan sudah dijalankan sesuai prosedur yang seharusnya oleh petugas?

IP2 : *Belum karena masih banyak sampah berserakan dan belum tertangani.*

Hasil pendapat dalam wawancara mendalam dengan Informan Kunci (IP2) bahwa setiap pelaksanaan belum dilaksanakan sesuai prosedur.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Komunikasi

Berdasarkan hasil dari penelitian maka komunikasi bahwa komunikasi berjalan dengan baik tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan non organik di atur dalam Undang-undang dengan aturan dan regulasi terkait dengan pengolahan persampahan dimana memiliki kendala internal dan kendala dari sisi eksternal, kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan untuk penanganan pengelolaan masih proses pengambilan dari sumbernya kemudian kita bawa ke TPA pengelolaan seperti proses 3R dan belum dilakukan 5R. Kendala yang terjadi partisipasi masyarakat yang masih kurang

Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang sangat efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Pendekatan komunikasi tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penanggulangan sampah sehinggah terciptanya tujuan yang ingin

di capai yaitu kota yang bersih bebas sampah. Pendekatan komunikasi ini di rumuskan dalam strategi komunikasi agar pesan informasi tersebut bisa di terima oleh masyarakat sesuai dengan yang di harapkan. (Masnidar dan Mahyuzar, 2018)

Berdasarkan hasil temuan peneliti diperoleh, menunjukkan bahwa komunikasi tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan non organik di atur dalam Undang-undang dengan aturan dan regulasi terkait dengan pengolahan persampahan sesuai dengan perencanaanya dan keterlibatan perorangan maupun kelompok swadaya masyarakat, perusahaan, pemerintah itu akan dilibatkan semuanya elemen masyarakat, kemudian kebijakan sudah diatur didalam Qanun. Kendala itu ada 2, ada kendala internal dan ada juga kendala dari sisi eksternal. kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan untuk penanganan pengelolaan masih proses pengambilan dari sumbernya kemudian kita bawa ke TPA pengelolaan seperti proses 3R dan belum dilakukan 5R. Kendala yang terjadi partisipasi masyarakat yang masih kurang dimana tempat disediakan tapi bukan kedalam tempat pembuangan sampah dalam membuang sampah, dan kesadaran masyarakat belum mengkhususkan tempatnya. kebijakan yang diterapkan seperti sesuai dengan pelaksanaanya misalnya penetapan langkah kerja setiap harinya, kendala yang terjadi partisipasi masyarakat yang kurang yang belum menggunakan sarana dan prasarana dengan sesuai.

Sejalan dengan penelitian (Dwiyanto, 2016) dalam pemetaan kemitraan melibatkan partisipasi semua pihak dan yang paling sentral adalah pihak masyarakat lokal itu sendiri. Partisipan inilah yang merancang berbagai perencanaan tindakan strategis seperti pengembangan mental dan keterampilan,

stimulasi dana, dan sarana serta pendampingan lembaga keuangan melalui sistem pelayanan keuangan mikro, serta evaluasi dan monitoring. Semua kegiatan diarahkan kepada kelompok masyarakat Kelurahan Sambiroto agar mereka memiliki komitmen dan keterampilan, serta akses sarana dan permodalan yang mendukung aktivitas usaha produktif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Yulistia, et al (2016) bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya berhasil untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

4.3.2 Sumber Daya

Berdasarkan hasil dari penelitian maka sumber daya sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu armada 25 unit dan 2 rusak, mobil ambrol untuk mengangkut mobil kontainer yaitu sebanyak 6 kontainer yang ada sarana dan prasarana dan kinerja sudah 78%. kemudian peran staf semua bekerja hanya saja kualitas kerjanya aja yang berbedah-beda dan diberi sanksi keras kalau tidak bekerja dikenakan peringatan satu atau dua kali. kemudian pelayanan yang terkadang dihubungi oleh orang rumah langsung. sarana dan prasarana yang dibutuhkan TPA

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III (2010), dalam mengimplementasikan kebijakan indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu : a. Staf, sumberdaya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf, b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan

dengan cara melaksanakan kebijakan, c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar pemerintah dapat dilaksanakan, d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Pengelolaan sumber daya manusia dalam mengelola sampah di kawasan kota pada tahap perencanaan meliputi pelaksanaan visi dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu menjadi unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup yang mencapai kehandalan dalam mewujudkan Kota yang berwawasan lingkungan. (Kurniawan, 2018)

Berdasarkan hasil temuan peneliti diperoleh, menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yaitu 21 armada trek sampah, tempat sampah yang hampir mencapai seribu, 22 buah kontainer, dipasar berupa beton agar tidak diangkat-angkat dan kemudian tempat sampah dari plastik, kemudian peran staf semua bekerja hanya saja kualitas kerjanya aja yang berbedah-beda dan diberi sanksi keras kalau tidak bekerja dikenakan peringatan satu atau dua kali, apabila tidak didengar maka diberhentikan itu biasanya kepada penyapu jalan. sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu armada 25 unit dan 2 rusak, mobil ambrol untuk mengangkut mobil kontainer yaitu sebanyak 6 kontainer yang ada sarana dan prasarana dan kinerja sudah 78%. Kemudian apabila ada petugas yang kurang berperan dipastikan ada mungkin penyebabnya adalah permasalahan dari luar yang menyebabkan pekerjaan kurang cepat. sarana dan prasarana yang dibutuhkan berupa mobil truk lapangan seperti beko. Peran yang dilaksanakan peran membersihkan dan mengontrol, kemudian pelayanan yang terkadang dihubungi oleh orang rumah langsung. sarana dan prasarana yang dibutuhkan TPA, kontainer dan beko untuk lapangan kemudian pekerjaan lapangan rutin

dilaksanakan karena setiap hari ada armada masing-masing yang rute perjalanannya sudah dibagi, yang ikut berperan aktif sekitar 25 unit dan orang kerja sekitar 44 orang ditambah 25 supir di TPA.

Sejalan dengan penelitian (Mulasari. 2017) Penerapan program pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemda di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul belum dapat mencakup seluruh wilayah. Program hanya dapat menjangkau di sekitar ibu kota kabupaten, hanya wilayah Kota Yogyakarta yang program pengelolaan sampah mandiri dapat menjangkau seluruh wilayah. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses layanan, kesediaan SDM, dan luasnya wilayah. Daerah perkotaan menjadi prioritas utama dari program. Tidak semua desa atau kelompok dalam masyarakat terjangkau program pengelolaan sampah pemerintah. Keaktifan dari wilayah/kelompok masyarakat desa memegang peranan penting dalam keikutsertaan program.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Maolani dan Ishak (2016) bahwa kurangnya tenaga kerja dan sumberdaya manusia serta fasilitas yang belum mendukung untuk menggunakan dalam pengelolaan atau pengangkutan sampah rumah tangga, dan pasitipasi serta kesadaran masyarakat sangat minim.

4.3.3 Disposisi atau Sikap

Berdasarkan hasil dari penelitian maka disposisi atau sikap menunjukkan bahwa kebijakan yang sudah diterapkan sebagian besar yang disusun terkait dengan kebijakan pengolahan persampahan dan sesuai dengan peraturan bupati dan qanun, kemudian setiap kesenjangan dievaluasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi. kebijakan yang sudah ditetapkan tingkat kepatuhannya sangat bagus, kemudian mengenai kesenjangan dan hambatan biasanya berdampak terhadap

penimbunan sampah, apabila tidak terkoodinir akan berdampak pada kesehatan masyarakat

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Masyarakat sudah banyak memiliki sikap yang baik dalam pengelolaan sampah, namun implementasi dalam bentuk perilaku masyarakat masih belum bisa berperilaku yang baik dalam pengelolaan sampah. Pembentukan sikap dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu seperti pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga agama dan faktor emosional (Azwar, 2017).

Berdasarkan hasil temuan peneliti diperoleh, menunjukkan bahwa kebijakan yang sudah diterapkan sebagian besar yang disusun terkait dengan kebijakan pengolahan persampahan dan sesuai dengan peraturan bupati dan qanun, kemudian setiap kesenjangan dievaluasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi. kebijakan yang sudah ditetapkan tingkat kepatuhannya sangat bagus, kemudian mengenai kesenjangan dan hambatan biasanya berdampak terhadap penimbunan sampah, apabila tidak terkoodinir akan berdampak pada kesehatan masyarakat karena gol tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu tercapainya tingkat kebersihan, kenyamanan dan keamanan yaitu target Adipura. sikap terhadap pelaksanaan penanganan sampah dikarenakan sudah kewajiban jadi jika terjadi tidak sesuai permasalahan masyarakatnya sering mereka menegur,

kemudian masyarakat yang tidak membayar PHD maka sampahnya tidak akan diangkut. sikap staf terhadap pelaksanaan melayani masyarakat melalui laporan lalu staf menyampaikan kepada KABID atau KASIE, kesenjangan dan hambatan banyak terjadi dari segi masyarakat seperti saat membayar redistribusi dan bagian lapangan sudah lengkap seperti bagian alat yang menunjang pekerjaan.

Sejalan dengan penelitian (Utami, et al. 2018) Dari segi pelaku yang terlibat, pengorganisasian proses pengelolaan sampah menjadi sederhana karena pihak yang terlibat hanya satu yaitu tukang sampah. Oleh karena itu pembangunan pola ini memerlukan waktu yang relatif singkat. Selain itu memaksimalkan peran tukang sampah dapat menjamin konsistensi rutinitas proses pengelolaan sampah karena proses tersebut terintegrasi pada kewajiban pekerjaannya. Namun dominasi peran yang terpusat pada tukang sampah juga mempunyai kelemahan karena tidak melibatkan pelaku terkait lainnya sesuai kapasitasnya masing-masing.

4.3.4 Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil dari penelitian maka struktur birokrasi bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik sudah menerapkan program pengolahan sampah berbasis 3R yang di lestarikan masyarakat. prosedur yang dilaksanakan sesuai struktur organisasi yang dibentuk sebelumnya dilakukan sesuai dengan qanun dan prsedur yang berlaku.

Struktur birokrasi walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi

karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu komoleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan meyebagikan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. struktur birokrasi yang ada pada bidang Operasional Dinas lingkungan hidup dan Pertanahan, susunan birokrasi yang ada dalam Dinas lingkungan hidup dan Pertanahan bidang Operasional tidak terlalu panjang dapat memudahkan dalam mengkoordinir petugas kebersihan dari Kasie, staff sampai mandor dan penyapu jalan dalam menjalankan implementasi pengelolaan sampah. Namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan dengan efektif karena pada kegiatan pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan sampah dengan struktur yang ada belum sepenuhnya bisa mengatasi kegiatan pengurangan sampah. Jumlah timbunan sampah yang ada tiap tahunnya mengalami kenaikan. Kendala-kendala yang ada pada struktur birokrasi saat ini adalah belum adanya bidang-bidang khusus untuk kegiatan penanganan dan pengurangan sampah. (Kendung, 2018)

Berdasarkan hasil temuan peneliti diperoleh, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik sudah menerapkan program pengolahan sampah berbasis 3R yang di lestarikan

masyarakat. prosedur yang dilaksanakan sesuai struktur organisasi yang dibentuk sebelumnya dilakukan sesuai dengan qanun dan prsedur yang berlaku.

Sejalan dengan penelitian (Wardi, 2016) Regulasi sebagai dasar kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah diwujudkan dalam bentuk peraturan perundangan di setiap kabupaten kota di DIY. Regulasi tersebut sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan dan berperan sebagai aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum (law enforcement) dikatakan sebagai salah satu upaya peningkatan partisipasi. Kesadaran masyarakat terhadap regulasi akan sangat membantu upaya pengelolaan sampah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Komunikasi tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan non organik sudah berjalan dengan baik yang di atur dalam qanun dengan aturan dan regulasi terkait dengan pengolahan persampahan dimana memiliki kendala internal dan kendala dari sisi ekstsernal.
2. Sumber daya dari aspek sarana dan prasarana belum maksimal ke kualitas kerjanya yang berbeda-beda dan diberi sanksi keras kalau tidak bekerja dikenakan peringatan satu atau dua kali.
3. Disposisi atau sikap dilihat melalui aspek kebijakan yang penerapannya terkait dengan kebijakan pengolahan persampahan dilaksanakan dengan peraturan bupati dan qanun, kemudian setiap kesenjangan dievaluasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi.
4. Struktur birokrasi terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik menerapkan program pengolahan sampah berbasis 3R yang di lestarikan masyarakat.

5.2 Saran

1. Bagi pemangku kebijakan mengenai kebijakan pengelolaan sampah melalui komunikasi, sumber daya, sikap dan birokrasi di perkotaan dengan melibatkan masyarakat, badan usaha, atau instansi pemerintah lain perlu dilakukan di daerah sehingga permasalahan sampah dapat dicegah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan akan berjalan dengan optimal ketika ada mekanisme

monitoring dan evaluasi yang baik dari pihak pemerintah daerah Aceh Barat. Kemudian dengan menyediakan sarana dan prasarana di lingkup wilayahnya, pemberian sanksi dan peringatan adanya penyediaan tong sampah di rumah masyarakat dan tempat buang sampah.

2. Bagi pihak Pemerintah Aceh Barat agar mengevaluasi setiap pelaksanaan mengenai penanganan persampahan organik dan non organik agar setiap kebijakan yang diterapkan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan teknik yang diperkirakan dapat lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2016. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Annihayah. 2017. *Urgensi manajemen persampahan ; belajar dari kasus Kota Bandung* [online]. Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Azwar, 2017. *Sikap Manusia Teori dan Pengukuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basriyanta. 2016. *Memanen sampah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum. 2017. *Tata Cara Penyelenggaraan Umum Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Pemukiman*. Jakarta
- Gelbert M, Prihanto D, dan Suprihatin A, 2017. *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan ?Wall Chart?*. Bu ku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, Malang
- Hill, Michael dan Peter Hupe. 2017. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. London-Thousand Oak-New Delhi: Sage Publication.
- Hadiwiyoto, Suweno. 2017. *Penanganan dan Pemanfaatan sampah*. Jakarta : Yayasan Idayu.
- Ismawati, A. 2016. *Gambaran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah UKM Mandiri di RW 002 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar*. UIN Alauddin Makassar
- Kendung, 2018. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Di Kabupaten Sitaro)*. Jurnal kesehatan Lingkungan. Volume 1 No 1
- Kementrian Lingkungan Hidup. 2016. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2016*. Jakarta, 2016. Diakses dari <http://menlh.go.id>, April 2021.
- Kemen PUPR RI, 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2011*. Jakarta
- Kurniawan, 2018. *Analisis Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pedestrian Malioboro Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta*. Jurnal Kesehatan Lingkungan. Volume 1 Nomor 1

- Lilliweri. Alo, 2017. *Dasar – Dasar Komunikasi Kesehatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Masnidar dan Mahyuzar, 2018. *Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Menyebarkan Informasi Penanggulangan Sampah Pada Masyarakat Kota Banda*. *urnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Volume 3 nomor 3
- Maolani dan Ishak. 2016. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste*. *urnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 2*
- Novayanti. 2017. *Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Praditya, 2018. *Studi Kualitatif Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sekaran Kota Semarang*. *Unnes Public Health Journal*. UPHJ Vol.1 No.2. ISSN 2252-6781
- Prajudi, Admodiredjo S. 2016. *Administrasi Dan Manajemen Umum Jilid II*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Saraswati et al. 2016. *Organisme perombak bahan organik*. Jakarta
- Soemirat. 2017. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: UGM press.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kesehatan*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Statistik Untuk Penelitian*. CV. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2017. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: BPFE-UST.
- Suparjan, Hempri Suyatno. 2016. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Tchobanoglous, G, Theisen, H, Vigil, S, 2017. *Integrated Solid WasteManagement*. Singapore: Mc Graw-Hill Book Co.
- Utami, et al. 2017. *Pengelolaan Sampah Rumahtangga Berbasis Komunitas: Teladan dari Dua Komunitas di Sleman dan Jakarta Selatan*. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Vol. 2 No. 1 ISSN : 1978-4333
- Wahab, S. 2016. *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Wahyono, 2016. *Pengolahan Sampah Organik Dan Sanitasi*. Aspek Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol.2, No. 2. ISSN 4455-7564

Yulistia, et al. 2016. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah*. Jurnal Lingkungan Hidup. Vol 1 No 2

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
PERSAMPAHAN ORGANIK DAN
ANORGANIK DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH BARAT**

Nama : Teuku Afrizal
NIM : 1405902010150
Fakultas : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Nama Informan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup 1 orang.

Pertanyaan :

1. Komunikasi

1. Bagaimanakah komunikasi dalam kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan non organik di dinas lingkungan hidup?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam komunikasi tentang penanganan persampahan organik dan anorganik di dinas lingkungan hidup?

2. Sumberdaya

1. Bagaimana ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan persampahan organik dan anorganik?
2. Adakah staf yang kurang berperan dalam kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik?

3. Disposisi/sikap

1. Apakah kebijakan yang sudah ditetapkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh staf?
2. Jika terjadi disposisi/sikap kesenjangan dan hambatan kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik, apa yang dilaksanakan?

4. Struktur Birokrasi

1. Adakah kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik di dinas lingkungan hidup sudah dijalankan sesuai prosedur?

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
PERSAMPAHAN ORGANIK DAN
ANORGANIK DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH BARAT**

Nama : Teuku Afrizal
NIM : 1405902010150
Fakultas : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Nama Informan : Kabid pelayanan 1 orang

Pertanyaan :

1. Komunikasi

1. Bagaimanakah komunikasi dalam kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan non organik di dinas lingkungan hidup?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam komunikasi tentang penanganan persampahan organik dan anorganik di dinas lingkungan hidup?

2. Sumberdaya

1. Sarana dan Prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan persampahan organik dan anorganik?
2. Bagaimana peran yang dijalankan petugas, Adakah staf yang kurang berperan dalam kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik?

3. Disposisi/sikap

1. Apakah kebijakan yang sudah ditetapkan sudah dilaksanakan dengan baik oleh staf?
2. Jika terjadi disposisi/sikap kesenjangan dan hambatan kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik, apa yang dilaksanakan?

4. Struktur Birokrasi

1. Adakah kebijakan pemerintah dalam penanganan persampahan organik dan anorganik di dinas lingkungan hidup sudah dijalankan sesuai prosedur?

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
PERSAMPAHAN ORGANIK DAN
ANORGANIK DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH BARAT**

Nama : Teuku Afrizal
NIM : 1405902010150
Fakultas : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Nama Informan : staf Dinas Lingkungan Hidup 1 orang

Pertanyaan :

1. Komunikasi

1. Dalam penanganan persampahan organik dan non organik di dinas lingkungan hidup, bagaimana komunikasi dalam penerapan kebijakan yang diterapkan?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam komunikasi tentang penanganan persampahan organik dan anorganik di dinas lingkungan hidup?

2. Sumberdaya

1. Sarana dan Prasarana apa saja yang dibutuhkan, bagaimana pengadaan sarana dan prasarana tersebut?
2. Peran apa yang anda laksanakan dalam penanganan persampahan organik dan anorganik?

3. Disposisi/sikap

1. Bagaimana sikap anda terhadap pelaksanaan penanganan sampah?
2. Jika terjadi disposisi/sikap kesenjangan dan hambatan, upaya yang dilaksanakan?

4. Struktur Birokrasi

1. Adakah setiap pelaksanaan sudah dijalankan sesuai prosedur yang seharusnya, dan bagaimana prosesnya?

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
PERSAMPAHAN ORGANIK DAN
ANORGANIK DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH BARAT**

Nama : Teuku Afrizal
NIM : 1405902010150
Fakultas : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Nama Informan : Pelaksana pekerja lapangan Dinas Lingkungan Hidup 1 orang

Pertanyaan :

1. Komunikasi

1. Bagaimana komunikasi dalam kebijakan pelaksanaan penanganan persampahan yang diterapkan pemerintah, adakah terlaksana?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam komunikasi tentang penanganan persampahan dilapangan?

2. Sumberdaya

1. Sarana dan Prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan persampahan organik dan anorganik dilapangan?
2. Bagaimana pekerjaan dilapangan yang dilaksanakan?
3. Berapa orang yang ikut berperan dan aktif dilapangan terhadap penanganan persampahan?

3. Disposisi/sikap

1. Bagaimana sikap anda terhadap pelaksanaan penanganan sampah?
2. Jika terjadi disposisi/sikap kesenjangan dan hambatan dalam menangani persampahan, upaya yang dilaksanakan?

4. Struktur Birokrasi

1. Adakah setiap pelaksanaan sudah dijalankan sesuai prosedur yang seharusnya, dan bagaimana prosesnya?

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
PERSAMPAHAN ORGANIK DAN
ANORGANIK DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH BARAT**

Nama : Teuku Afrizal
NIM : 1405902010150
Fakultas : Fakultas Kesehatan Masyarakat
Nama Informan : Masyarakat 1 orang

Pertanyaan :

1. Komunikasi

1. Bagaimana komunikasi dalam kebijakan pelaksanaan penanganan persampahan yang diterapkan pemerintah, adakah terlaksana?

2. Sumberdaya

1. Sarana dan Prasarana apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam penanganan persampahan organik dan anorganik dilapangan?

3. Disposisi/sikap

1. Bagaimana sikap petugas terhadap pelaksanaan penanganan sampah?

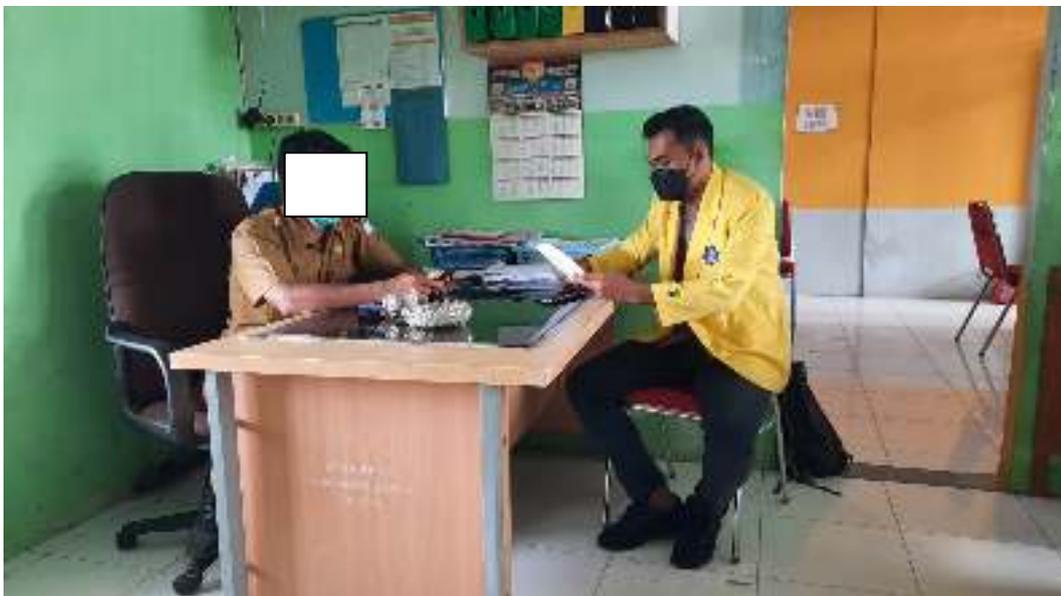
4. Struktur Birokrasi

1. Adakah setiap pelaksanaan penanganan persampahan sudah dijalankan sesuai prosedur yang seharusnya oleh petugas

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Peneliti sedang wawancara dengan Informan Utama Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 2. Peneliti sedang wawancara dengan informan kunci Kabid pelayanan



Gambar 3. Peneliti sedang wawancara dengan Informan Pendukung (IP1) staf Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 4. Peneliti sedang wawancara dengan Informan Pendukung (IP2) Pelaksana pekerja lapangan Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 4. Peneliti sedang wawancara dengan Informan Pendukung (IP3) Masyarakat